



**AKUNTABILITAS TKPKD KOTA SEMARANG DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN SESUAI PERDA
NOMOR 4 TAHUN 2008 DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan dalam Rangka Menyelesaikan Studi Strata 1 (S1)
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:

Shellika Parasdni

3301411132

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

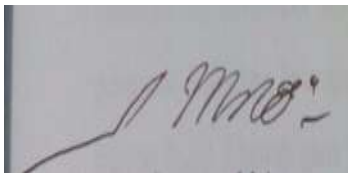
Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 September 2015

Menyetujui

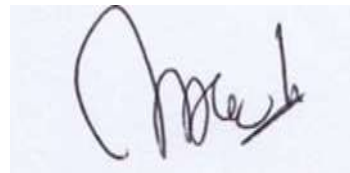
Dosen Pembimbing I



.Drs. Sumarno, M.A

NIP. 195610101985031003

Dosen Pembimbing II

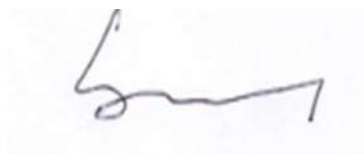


Martien H. S., S.Sos., M.Si

NIP. 197303312005012001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd

NIP : 19610127 198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

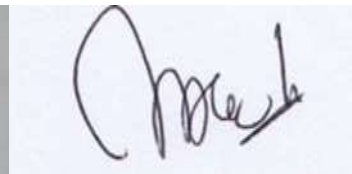
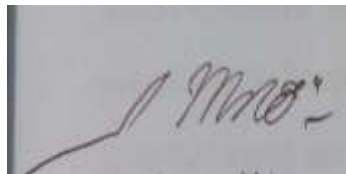
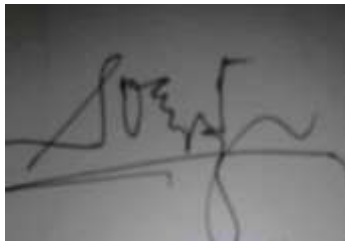
Tanggal : 22 September 2015

Menyetujui

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Drs. Sunarto, SH, M.Si
NIP. 196306121986011002

Drs. Sumarno, M.A
NIP. 195610101985031003

Martien H. S., S.Sos., M.Si.
NIP. 197303312005012001

Mengetahui,

Dekas FIS UNNES

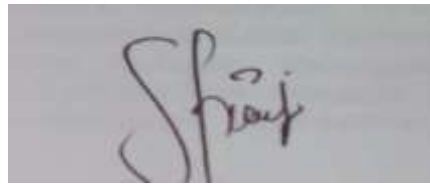


Drs. Subagyo M.Pd.
FIS NIP. 195108081980031003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, 15 September 2015

A photograph of a handwritten signature in dark ink on a light-colored surface. The signature is stylized and appears to read 'Shellika Parasdini'.

Shellika Parasdini

NIM. 3301411132

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow” Albert Einstein

“Kekuatanmu harus lebih besar dari ketakutanmu menghadapi segala hal dalam hidup” Penulis

PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Thomas Rudi Haryanto, S.Pd dan Ibunda Peni Indriyati yang telah memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti
2. Suami tercinta Alif Widodo, S.E yang selalu sabar serta memberikan doa, semangat dan motivasi
3. Adik Anugrah Dwiki Saputra yang selalu mendoakan
3. Sahabat- sahabat tercinta Isma, Ella, Kiky, Belia, Alin dan Mei yang telah memberikan kegembiraan dan senyuman dari awal perkuliahan sampai akhir.

4. Teman- teman seperjuangan jurusan Politik dan Kewarganegaraan angkatan tahun 2011 yang terus berjuang bersama untuk menggapai cita-cita

5. Almamater UNNES tercinta

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT hanya karena pertolongan dan ijinNya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pemerintah Kota Semarang Dalam Menanggulangi Kemiskinan Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008”. Penyusunan skripsi ini untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sebagai Sarjana Pendidikan di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, arahan dan kesabaran dari berbagai pihak secara moril baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1.Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang atas kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat.
- 2.Dr. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang atas kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi di waktu yang tepat.
- 3.Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan saran dan memfasilitasi sehingga dapat menyusun skripsi.
- 4.Drs. Sumarno, M.A, sebagai pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Martien Herna Susanti, S.Sos, M.Si, sebagai pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Sri Hatono dan semua informan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian

7. Bapak Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah membimbing, memberikan inspirasi, motivasi dan ilmu yang selama ini diberikan kepada kami

8. Teman-teman PPKn 2011 yang telah memberikan motivasi dan dorongan

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Atas segala bimbingan, semangat, inspirasi dan bantuannya, penulis mengucapkan terimakasih semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa membalas segala bantuan dan memberikan berkah dalam hidup. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita.

SARI

Parasdini, Shellika. 2015. Akuntabilitas TKPKD Kota Semarang Dalam Penanggulangan Kemiskinan Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008 Di Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Drs. Sumarno, M.A Pembimbing II, Martien Herna S.,S.Sos.,M.Si

Kata Kunci : Akuntabilitas, TKPKD Kota Semarang, Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Semarang merupakan permasalahan yang perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kota Semarang untuk segera ditanggulangi. Penanggulangan kemiskinan diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 yang pelaksanaannya di mulai dari verifikasi data warga miskin, penyusunan dan pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi hasil dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang yang anggotanya merupakan pemerintah Kota Semarang. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan laporan setiap akhir tahun sebagai wujud pertanggungjawaban (Akuntabilitas) pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang. Pertanggungjawaban (Accountability) dari pemerintah itu sendiri merupakan faktor penting dalam suksesnya program penanggulangan kemiskinan yang telah dibuat, termasuk sudah terlaksana atau belum sesuai Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat miskin di Kota Semarang ? (2) Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008 ? (3) Bagaimana pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008 di Kota Semarang ? Tujuan dari penelitian ini yaitu : (1) Memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kota Semarang (2) Memberikan wawasan tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan sesuai perda no 4 tahun 2008 (3) Memberikan gambaran bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah kota semarang dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang dijadikan suatu objek adalah Pemerintah Kota Semarang (TKPKD Kota Semarang). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi yang diolah dan diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk mengecek keabsahan data. Teknik analisis data secara interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Faktor-faktor banyaknya kemiskina di Kota Semarang disebabkan karena rendahnya pendidikan, kurang

ketrampilan, cacat fisik, tidak memiliki factor produksi (2) Upaya penanggulangan kemiskinan dengan bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, ketrampilan, modal usaha, dan perlindungan rasa aman (3) Akuntabilitas Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan serta pembuatan laporan.

Saran dari peneliti : (1) Pemerintah terus melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, dan menambah program yang belum ada seperti pendidikan luar sekolah untuk anak jalanan (2) LSM, Perguruan Tinggi, Sektor Swasta, dan Tokoh masyarakat membantu tidak hanya biaya saja, namun juga meningkatkan keikutsertaan dalam memonitoring pemerintah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan (3) TKPKD terus menyusun dan memantau pelaksanaan program agar dapat dilaksanakan sesuai dengan programnya dan jangka waktu yang ditentukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	vi
SARI	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penegasan Istilah	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A.	Landasan Teori	14
B.	Kerangka Berpikir	42

BAB III : METODE PENELITIAN

A.	Lokasi Penelitian	45
B.	Fokus Penelitian	45
C.	Sumber Data Penelitian	47
D.	Metode Pengumpulan Data	49
E.	Validitas Data Penelitian.....	51
F.	Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	60
B.	Pembahasan.....	101

BAB V : PENUTUP

1.	Kesimpulan.....	113
2.	Saran	115

DAFTAR PUSTAKA.....	116
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Tanggung jawab Sebagai <i>Accountability</i>	17
Gambar 1.2 Tanggung jawab Sebagai <i>Input</i> dan <i>Output</i>	17
Gambar 1.3 Hierarki Tingkat Akuntabilitas.....	19
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Balwin dan Meler.....	24
Gambar 2.2 Tiga Strategi Untuk Mengentaskan Masyarakat Dari Kemiskinan...	28
Gambar 4.1.2 Sususnan Keanggotaan TKPKD Kota Semarang.....	64
Gambar 4.1.4.1 Pelatihan Pangan Lokal.....	82
Gambar 4.1.4.2 Bantuan Modal Usaha Mesin Jahit.....	82
Gambar 4.1.4.3 Pola Tribina.....	84
Gambar 4.1.4.4 Kerangka Pikir Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan.....	86
Gambar 4.1.4.5 Kerjasama Sinergis Gerdu Kempling.....	87
Gambar 4.1.4.6 Mekanisme Pelaksanaan CSR.....	89
Gambar 4.1.5.1 Laporan PPT Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014.....	93

Gambar 4.1.5.2 Pamsimas RW 07 Kelurahan Tembalang.....	96
Gambar 4.1.5.3 Budidaya Ikan Lele di Kelurahan Bulusan.....	97
Gambar 4.1.5.4 Pemberian Bantuan Oleh Tim Penggerak PKK.....	98
Gambar 4.1.5.5 Pemberian Kartu Semarang Sehat.....	98

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Jumlah Warga Miskin di 16 Kecamatan se-Kota Semarang Tahun 2013.....	2
Tabel 2	Jumlah Warga Miskin di 16 Kecamatan se-Kota Semarang Tahun 2015.....	3
Tabel 3.1	Model dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.....	31
Tabel 4.1.4.1	Jumlah Warga Rawan Miskin (KK).....	72
Tabel 4.1.4.2	Jumlah Warga Rawan Miskin (Jiwa).....	72
Tabel 4.1.4.3	Jumlah Warga Miskin (KK).....	72
Tabel 4.1.4.4	Jumlah Warga Miskin (Jiwa).....	73
Tabel 4.1.4.5	Jumlah Warga Sangat Miskin (KK).....	73
Tabel 4.1.4.6	Jumlah Warga Sangat Miskin (Jiwa).....	73
Tabel 4.1.5.1	Perkembangan Gerdu Kempling Tahun 2011-2015.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Lampiran 3. SK Walikota Nomor 465/146/2014

Lampiran 4. Perkembangan Jumlah Warga Miskin Kota Semarang Tahun

2009, 2011, 2013, 2015

Lampiran 5. Rekapitulasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015

Lampiran 6. Kegiatan SKPD-TKPKD Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2011-2015

Lampiran 7. PPT Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemsikinan

(Gerdu Kempling) Tahun 2014

Lampiran 8 . Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang umum kota-kota besar di Indonesia. Ini disebabkan banyaknya penduduk urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan, sementara kesempatan kerja semakin sulit sehingga kebanyakan para imigran hidup dibawah garis kesejahteraan. Selain itu, kestabilan perekonomian dan pembangunan masih dalam tahap pengoptimalan. Kemajuan perekonomian dan pembangunan sangat dipengaruhi oleh angka kemiskinan masyarakatnya. Jika angka kemiskinan masyarakatnya rendah dan berkurang setiap tahun sejalan dengan pendapatan masyarakatnya yang naik, maka perekonomian dan pembangunan pun maju, namun jika angka kemiskinan masih tinggi, sementara pendapatan masyarakatnya rendah, maka akan sulit mewujudkan kemajuan ekonomi.

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan sebagai tindakan pemerintah yang ditunggu masyarakat untuk mengurangi kemiskinan yang kian merebak. Seperti kurangnya pangan, kawasan

perkampungan kumuh, pendidikan rendah dan banyaknya pengangguran dan/atau gelandangan.

Penanggulangan kemiskinan menjadi masalah yang sangat mendesak untuk ditanggulangi pemerintah kota / daerah. Penanggulangan kemiskinan dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kota Semarang sebagai kota besar di provinsi Jawa Tengah, dengan kepala pemerintahannya seorang walikota, selain itu juga sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah.

Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan berbagai lapisan masyarakat dari bawah ke atas. Terbagi dalam 16 kecamatan yaitu Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat, Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, dan Tugu . Di bawah ini merupakan perbandingan jumlah data warga miskin Kota Semarang tahun 2013 dan 2015

Tabel 1 Jumlah Warga Miskin di 16 Kecamatan se-Kota Semarang Tahun 2013

Kecamatan	Jumlah Warga Miskin
Semarang tengah	17.613 orang
Semarang timur	21.587 orang
Semarang utara	42.907 orang

Semarang selatan	20.430 orang
Semarang barat	43.037 orang
Gayamsari	22.202 orang
Genuk	24.541 orang
Pedurungan	25.095 orang
Candisari	24.430 orang
Gajahmungkur	15.501 orang
Tembalang	33.901 orang
Banyumanik	15.079 orang
Gunungpati	19.872 orang
Mijen	14.783 orang
Ngaliyan	20.834 orang
Tugu	10.933 orang

Sumber : <http://simgakin.semarangkota.go.id> (30 Januari 2015)

Dari tabel diatas dapat di lihat pada tahun 2013 angka kemiskinan Kota Semarang tersebar merata di setiap kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya warga miskin Kota Semarang tergolong tinggi. Berbeda dengan tabel 1 di atas, pada tahun 2015 di bawah ini banyaknya warga miskin meningkat dari tahun 2013.

Tabel 2 Jumlah Warga Miskin di 16 Kecamatan se-Kota Semarang Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Warga Miskin
Semarang tengah	18.390 orang
Semarang timur	20.610 orang

Semarang utara	46.100 orang
Semarang selatan	21.371 orang
Semarang barat	40.042 orang
Gayamsari	22.109 orang
Genuk	26.264 orang
Pedurungan	25.832 orang
Candisari	24.636 orang
Gajahmungkur	15.900 orang
Tembalang	36.823 orang
Banyumanik	14.644 orang
Gunungpati	19.872 orang
Mijen	15.067 orang
Ngaliyan	21.951 orang
Tugu	10.708 orang

Sumber : <http://simgakin.semarangkota.go.id> (13 Juni 2015)

Sedangkan informasi terbaru banyaknya warga miskin kota Semarang tahun 2015 mengalami peningkatan di beberapa kecamatan dibandingkan dengan data hasil verifikasi dan identifikasi banyaknya warga miskin Kota Semarang pada tahun 2013 terdapat kenaikan sebanyak 4.674 KK atau 5.658 jiwa secara keseluruhan. Dapat ditunjukan pada tahun 1013 dengan prosentase 21,49 persen menjadi 21,52 persen di tahun 2015, ini menunjukan peningkatan jumlah warga miskin sebesar 0,03 persen. <http://simgakin.semarangkota.go.id> (13 Juni 2015)

Kota Semarang dipilih menjadi subjek penelitian karena adanya kesesuaian minat peneliti terhadap masalah yang ada di Kota Semarang, dengan konsentrasi penelitian pada penanggulangan kemiskinan. Di dalamnya mencakup program-program pemerintah (TKPKD) Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan yang cukup banyak, bahkan Simgakin (Sistem Informasi Warga Miskin) sebagai website resmi pemerintah daerah Kota Semarang menyampaikan bahwa warga Kota Semarang tergolong miskin. Tidak hanya itu, akuntabilitas TKPKD Kota Semarang dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan juga dijadikan penelitian utama sesuai dengan judul yang diangkat.

Penanggulangan kemiskinan merupakan masalah yang memerlukan perhatian pemerintah Kota Semarang. Salah satunya dengan cara memberikan bantuan bagi masyarakat miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan demi terwujudnya keadilan sosial sesuai cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke 4, yang berbunyi :

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang...”

Pemerintah Kota Semarang mempunyai aturan hukum tersendiri untuk mengatasi kemiskinan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dengan adanya perda tersebut

diharapkan program penanggulangan kemiskinan Kota Semarang dapat terarah dan terealisasi dengan tepat, maka pemerintah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/0320/2010 tanggal 2 September 2010 sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota. TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan diharapkan sinergitas antara pemerintah kota, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro. Terkait dengan penanganan penanggulangan kemiskinan tersebut, pemerintah (TKPKD) Kota Semarang mencanangkan beberapa program.

Salah satunya adalah Gerdu Kempling merupakan Gerakan Terpadu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Lingkungan yang mencakup lima bidang tersebut. Program Gerdu Kemling, dengan tahap pelaksanaan 2 (dua) kali dalam setahun. Pada tahun 2011 terdapat 32 kelurahan dijadikan subjek pelaksanaan. Tahun 2012 ada 48 kelurahan, 2013 juga terdapat 48 kelurahan untuk pelaksanaan Gerdu Kemling.

Berbeda dengan tahun 2014 hanya 32 kelurahan yang dijadikan *project* program tersebut, namun di tahun 2015 terlihat yang paling sedikit hanya 17 kelurahan saja.

<http://simgakin.semarangkota.go.id/2015/website/berita/detail/25/pemberd-ayaan-masyarakat-miskin-melalui-program-gerdu-kempling> (24 juni 2015)

Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan pasal 4 pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Kota Semarang berdasarkan asas adil dan merata, partifipatif, demokratis, koordinat/keterpaduan, tertib hukum, dan saling percaya yang menciptakan rasa aman. Program-program penanggulangan sebagaimana tertulis dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 2 bertujuan untuk 1) menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, 2) mempercepat penurunan jumlah warga miskin, 3) meningkatkan partisipasi masyarakat, dan 4) serta menjamin konsisten, integritas, sinkronisasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Bukan hanya TKPKD saja, namun masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya. Jika antar lapisan masyarakat saling memperhatikan kesejahteraan satu sama lain, maka penanggulangan kemiskinan akan lebih mudah dilaksanakan, karena yang tahu keadaan sebenarnya dirasakan oleh masyarakat adalah mereka sendiri.

Program-program yang sudah di tetapkan oleh TKPKD Kota Semarang akan terlaksana dengan baik jika diikuti dengan kerja nyata dari

pemerintah itu sendiri. Kesungguhan pemerintah (TKPKD) dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakatnya dapat dilihat dari suksesnya pelaksanaan program tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya transparansi pemerintah guna menanggulangi kemiskinan di kota Semarang. Hasil dari pelaksanaannya tentu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban (*Accountability*) dari pemerintah itu sendiri merupakan faktor penting dalam suksesnya program penanggulangan kemiskinan yang telah dibuat, termasuk sudah terlaksana atau belum sesuai Peraturan Daerah No 4 Tahun 2008. Secara sederhana, tanggungjawab didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji (*commitment*). Dengan *accountability* yang besar, maka pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dapat terwujud dalam rangka mencari kelembagaan yang profesional dan kompeten. Isu yang mengarah pada pemerintah adalah pemerintahan yang transparan dan akuntabel kepada publik, termasuk kemampuan administrasi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Kemajuan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan. Membangun akuntabilitas melalui pelaporan kinerja pembangunan secara transparan jika ingin mendapatkan *trust* atau kepercayaan dari masyarakat (Lukito 2014 : 2). Hal ini sebagai bahan koreksi disisi mana yang sudah atau belum terlaksana, serta mencari sebab dan solusinya agar dapat dijalankan

dengan baik, maka pemerintah (TKPKD) Kota Semarang membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan keterkaitan dengan bidang kajian program studi PPKn itu sendiri adalah nilai-nilai yang akuntabel dari pemerintah (TKPKD) Kota Semarang sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dalam hal ini tentang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Perda Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008. Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam tulisan skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas TKPKD Kota Semarang dalam penanggulangan kemiskinan sesuai perda nomor 4 tahun 2008 di Kota Semarang”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat miskin di Kota Semarang ?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh TKPKD Kota Semarang dalam penanggulangan kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008 ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban (akuntabilitas) TKPKD Kota Semarang dalam penanggulangan kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008 di Kota Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kota Semarang
2. Memberikan wawasan tentang upaya yang dilakukan oleh TKPKD kota Semarang dalam penanggulangan kemiskinan sesuai perda no 4 tahun 2008
3. Memberikan gambaran bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) TKPKD kota Semarang dalam penanggulangan kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaatsecarateoritis

- a. Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembangunan ilmu pengetahuan bidang ilmu sosial khususnya PPKn, serta sebagai penelitian lanjutan tentang akuntabilitas pemerintah Kota Semarang dalam upaya menanggulangi kemiskinan

1.4.2 Manfaatsecarapraktis

- a. Bagi pemerintah Kota Semarang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input dan dasar pertimbangan dalam mengupayakan program yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan Kota Semarang
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar

warga miskin, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

1.5 Batasan Istilah

1.5.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan dapat bertanggung jawab terhadap hal-hal yang diminta pertanggungjawabannya. (Ndhara, 2003:89)

Sedangkan Lukito (2014:2) mengartikan Akuntabilitas sebagai kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggung-jawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

1.5.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota Semarang khususnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemerintah guna menangani penanggulangan kemiskinan. Secara struktural didalam TKPKD terdiri dari Ketua TKPKD, Wakil Ketua TKPKD, Sekretaris TKPKD, dan Wakil Sekretaris TKPKD. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/0320/2010 TKPKD merupakan Tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kota

Semarang sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pemerintah dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan (Exercising power) seperti yang di katakan Apter dalam *The Internasional Encyclopedia of the Social Science*, 1972 (Ndhara, 2003:71)

Pemerintah daerah berarti penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dengan kepala pemerintahan seorang Gubernur, dan kabupaten/kota oleh seorang Bupati/Walikota. (Setiawan, 20014:14-15)

1.5.3 Miskin

Miskin yang dimaksud dalam penelitian ini diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya alat pemenuh kebutuhan dasar, pendidikan, dan pekerjaan. (Perda Nomor 4 Tahun 2008 Tetang Penanggulangan Kemiskinan)

1.5.4 Warga Miskin

Warga Miskin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki KTP dan/atau KK Kota Semarang (Perda Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan)

1.5.5 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penanggulangan kemiskinan masyarakat Kota Semarang. Penanggulangan kemiskinan merupakan cara dan program yang dibuat oleh pemerintah guna mengurangi atau menekan angka kemiskinan. Sedangkan program penanggulanga kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi/ atau menanggulangi kemiskinan. (Perda Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan)

1.5.6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kamiskinan. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota (Setiawan, 2014:17)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas banyak mempunyai arti sesuai dengan konteks pembahasannya. Akuntabilitas pemerintah daerah berarti pertanggungjawaban pejabat (yang memerintah) pemerintahan terhadap kebijakan bagi masyarakatnya (yang diperintah). Lukito (2014:2) mengemukakan bahwa Pemerintah bertanggung-jawab menyediakan pelayanan publik yang berdasarkan regulasi yang ada. Dimana pemerintah harus dengan tepat mengenali masalah yang ada dimasyarakat, kemudian membuat atau menetapkan arah dan strategi yang tepat dalam mengatasinya. Selanjutnya pemerintah dapat mengkuantifikasi janji kepada masyarakat, dan mengukur segala langkah yang diambil melalui pemantuan dan evaluasi hasil kinerjanya untuk dijadikan input.

Lembaga administrasi negara membedakan akuntabilitas ke dalam tujuh macam yaitu :

- a. *Traditional* atau *regularity accountability* memfokuskan pada transaksi-transaksi reguler atau transaksi-transaksi fiskal untuk mendapat informasi mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku yang terkait dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan peraturan fiskal dan peraturan pelaksanaan administrasi.

- b. *Managerial accountability*, menitik beratkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya lainnya.
- c. *Program accountability*, memfokuskan pada pencapaian hasil operasi pemerintah.
- d. *Process accountability* memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi.
- e. Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan taatan terhadap perundang-undangan.
- f. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil-hasil kegiatan pemerintah.
- g. Akuntabilitas prosedural, yaitu pertanggungjawaban mengenai suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan. (Lukman Hakim, 2012: 179-180)

Menurut Rosjidi (2001:145) akuntabilitas dibedakan menjadi dua tipe, yaitu :

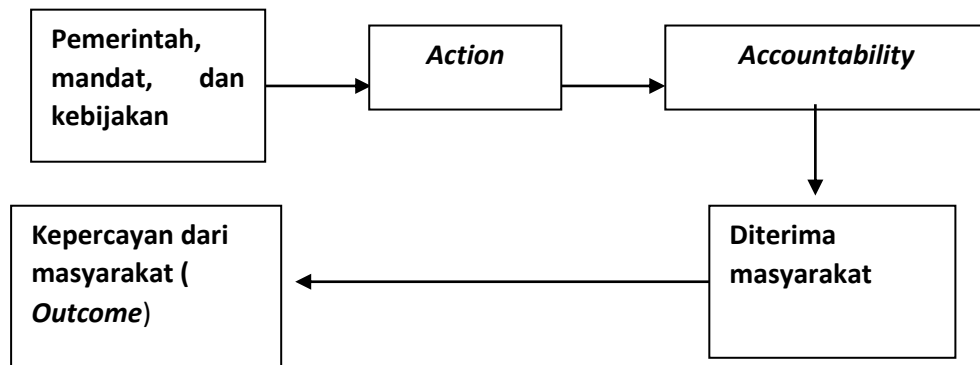
a. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya secara langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)

b. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

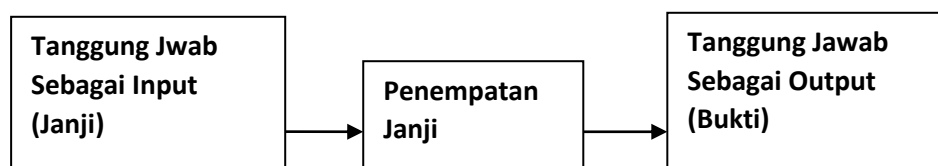
Akuntabilitas adalah efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pemerintahan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, baik standar *input*, standar *output*, standar *throughput*, dan standar *outcome* (Ndhara, 2003:89)



Gambar 1.1 Tanggung Jawab Sebagai *Accountability*

Sumber : Ndhara, 2003:95

Pada bagan diatas, jika dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan maka dimulai dari bagan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dilanjutkan dengan pelaksanaan dari program-program penanggulangan kemiskinan. Kemudian hasil dari pelaksanaan tersebut dapat di mintai pertanggungjawabnya. Sudah atau belum suksesnya program akan dirasakan oleh masyarakat, ini sebagai *outcome* rasa percaya atau tidak masyarakat terhadap pemerintah.



Gambar 1.2 Tanggung Jawab Sebagai Input dan Output

Sumber : Ndraha, 2003:117

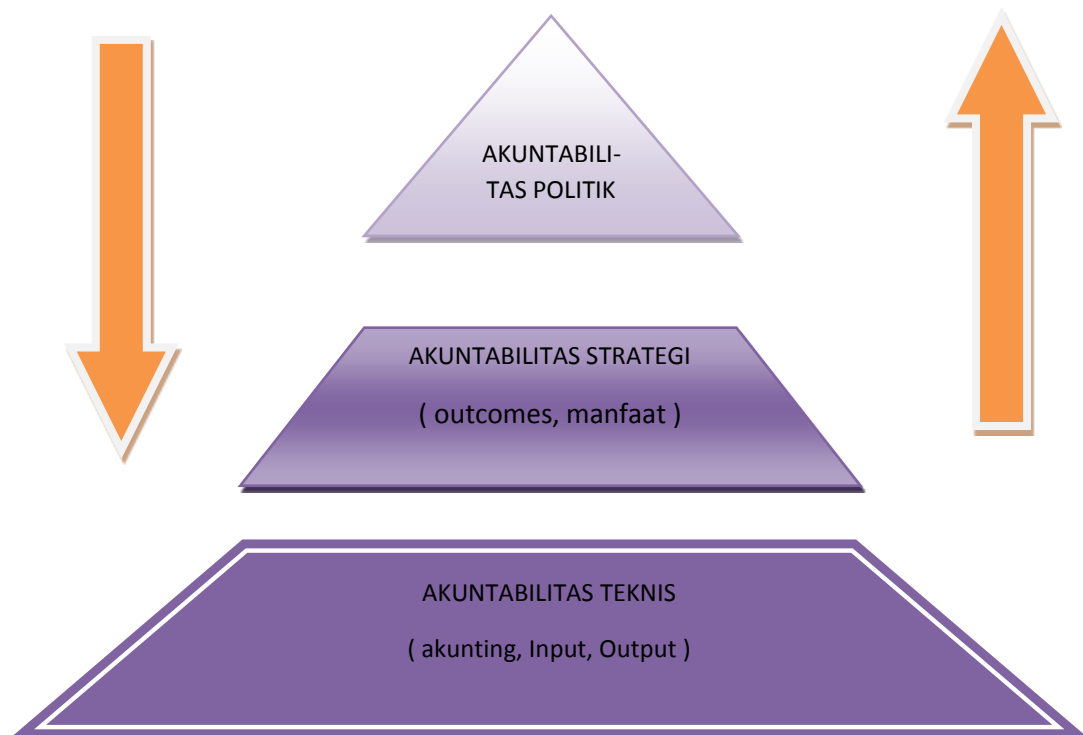
Menurut Ndraha (2003 : 105-106) Terwujudnya tanggungjawab yang baik dari pemerintah, akan memunculkan hubungan Janji Dengan

Percaya (HJDP) antara pemerintah dengan masyarakat. Misalnya pada hubungan transaksional dimana pemerintah dengan yang diperintah sama halnya seperti produsen dan konsumen sebagai berikut :

- 1) Pemerintah menawarkan berbagai pilihan produk kepada masyarakat, baik berupa barang, jasa, hingga pelayanan
- 2) Masyarakat bebas memilih produk yang dianggapnya sesuai dengan aspirasinya
- 3) Jika masyarakat telah menjatuhkan pilihan, maka pemerintah harus menepati janjinya
- 4) Untuk menguji apakah janji tersebut ditepati, masyarakat melakukan kontrol sosial
- 5) Apabila janji tersebut ditepati, berarti pemerintah telah bertanggung jawab
- 6) Jika pemerintah bertanggung jawab, maka tumbuh kepercayaan dari masyarakat

Akuntabilitas juga bersifat berjenjang. Dari akuntabilitas yang bersifat individual sampai dengan hasil pembangunan yang merupakan pertanggung-jawaban secara kolektif. Tingkat akuntabilitas ada 3 (tiga), dimulai dari akuntabilitas teknis yaitu pertanggung-jawaban terhadap input dan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Kedua, akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggung-jawaban outcomes atau manfaat. Dan yang terakhir, akuntabilitas politik adalah pertanggung-jawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan

sosial/ekonomi/politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai akibat dari berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian, adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik sebagai kunci dalam mencapai hasil yang komplementer (Lukito, 2014 : 3-4).



Gambar 1.3 Hierarki Tingkatan Akuntabilitas

Sumber : (Lukito, 2014 : 4)

2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan sebenarnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan untuk melangsungkan hidup dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau

sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan memiliki empat macam, yaitu :

a. Kemiskinan Absolut

Menunjukan keadaan seseorang atau sekelompok masyarakat yang taraf hidupnya begitu rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan bukan makanan)

b. Kemiskinan Relatif

Jenis ini berkaitan dengan distribusi atau pembagian pendapatan nasional di antara berbagai lapisan masyarakat, yaitu berapa bagian yang diperoleh golongan masyarakat yang satu dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.

c. Kemiskinan Struktural

Menunjukan ketidakmampuan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebabkan oleh struktur masyarakat yang menghalanginya. Seperti pihak yang kuat berpeluang mengeksploitasi sesama sedangkan yang lemah tidak bisa berlutik.

d. Kemiskinan Sosial-Budaya

Kemiskinan yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan nilai budaya masyarakat. Misalnya terkait dengan nilai kerja, waktu, dan alam yang menyebabkan suatu masyarakat tertinggal (Abd' rachim, 2009:58-59)

Menurut faktor yang melatarbelakanginya, Suyanto (2013 : 8-9) menyebutkan akar penyebab kemiskinan menjadi dua katagori, yaitu :

- a. Kemiskinan alamiah, yakni kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya dan/atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah, biasanya terjadi pada masyarakat tradisional.
- b. Kemiskinan buatan, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Dengan demikian, masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya hasil produksi masyarakat dapat membebaskan anggota dari kemiskinan.

Berbeda dengan itu, BPS menggunakan tiga indikator dalam mengukur kemiskinan, yaitu :

- a. Kemiskinan Absolut

Indikator yang pertama ini mengukur kemiskinan dari kondisi di bawah pendapatan yang menjamin kebutuhan dasar pangan, pakaian, dan perlindungan.

- b. Indeks jurang kemiskinan

Jurang kemiskinan sebagai alat ukur dari rata-rata jurang pemisah antara pendapatan kaum miskin dengan garis kemiskinan

- c. Indeks kesulitan kemiskinan

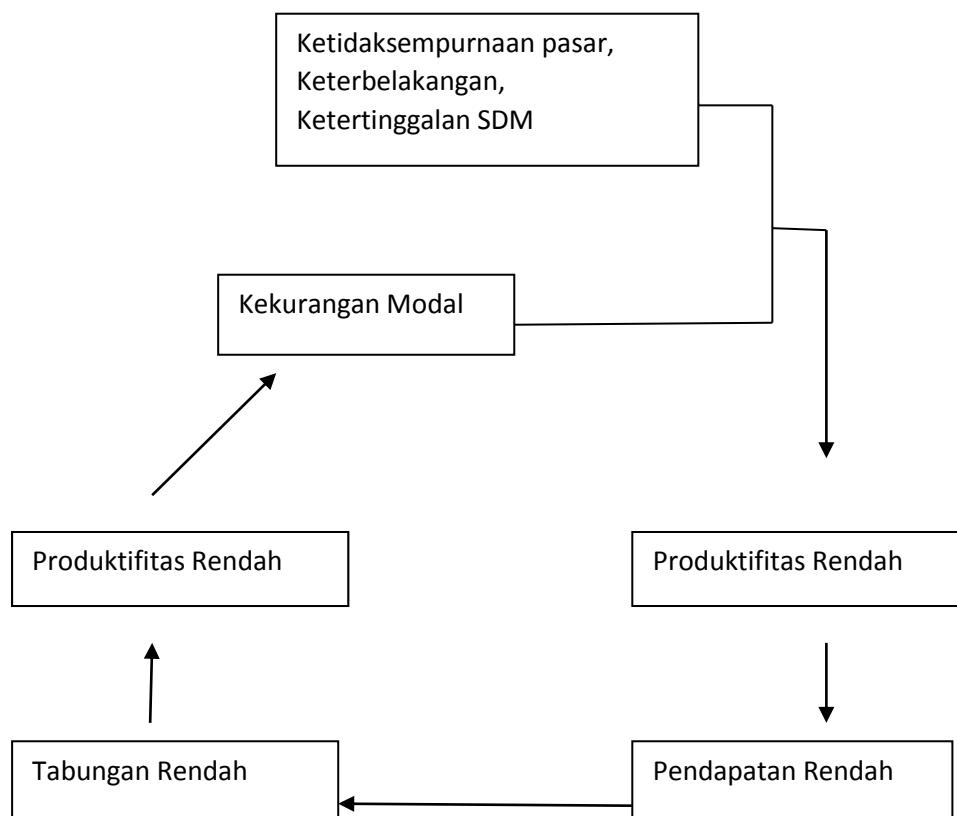
Sedangkan indikator yang ketiga adalah indeks jurang kemiskinan yang sedikit didistribusikan. (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002:34)

Dari berbagai studi yang ada, kemiskinan mempunyai beberapa ciri sebagai berikut :

- a. Mereka yang hidup digaris kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- b. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha.
- c. Tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu belajar, begitu juga dengan anak-anak mereka yang harus membantu mencari nafkah tambahan.
- d. Mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau walaupun ada relatif sedikit. Karena kesulitan hidup di desa, ini mendorong banyak dari mereka untuk urbanisasi ke kota untuk mengadu nasib.
- e. Yang tinggal di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau *skill* dan pendidikan (Suyanto, 2013 : 5-6)

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran /

rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan negara akan tetap miskin dan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Pemikiran ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Mudrajat Kuncoro (1997) mengatakan suatu negara itu miskin karena dia miskin (*a poor country is a poor because it is poor*)



Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Balwin dan Meier

Sumber : Kuncoro, 1997

Peraturan Walikota No.18c Tahun 2009 tentang indikator, kriteria dan klasifikasi warga miskin Kota Semarang tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat mengkonsumsi makanan pokok dengan menggunakan tiga sehat (nasi, sayur, dan lauk) dua kali sehari dan tidak dapat mengkonsumsi daging, telur, ikan, daging ayam dalam seminggu satu kali.
- 2) Tidak punya rumah sendiri atau menempati rumah yang luas lantainya kurang dari delapan meter persegi, 50 persen lantai rumahnya terbuat tanah, dinding terbuat dari bambu atau kayu berkualitas rendah, dan listrik berdaya 450 watt.
- 3) Tidak mampu membeli pakaian yang baru setiap anggota rumah tangga satu stel dalam setahun dan tidak mampu mempunyai pakaian yang berbeda untuk keperluan yang berbeda.
- 4) Tidak mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA atau sederajat
- 5) Tidak mampu menjangkau berobat ke pelayanan kesehatan dasar dan atau pelayanan keluarga berencana. Tidak mampu menjangkau berobat ke pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, tidak memiliki sarana sanitasi dasar terdiri atas sarana air bersih dan jamban, serta salah satu anggota keluarga berkebutuhan khusus atau difable.
- 6) Warga yang tidak memiliki aset produktif dan tidak mempunyai aset yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan dasar selama tiga bulan serta penghasilan keluarga tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar atau sesuai

kebutuhan hidup minimum. (Sumber : Peraturan Walikota No.18c Tahun 2009 tentang indikator, kriteria dan klasifikasi warga miskin Kota Semarang tahun anggaran 2009) .

Menurut Strahm (1999 : 184-186) ada tiga strategi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, yaitu :

a. Integrasi ke dalam pasar bebas

Konsep pembangunan macam ini berusaha mempertahankan kondisi pasar liberal yang ada sekarang ini. Keterlibatan negara-negara berkembang diusahakan secepat mungkin dengan meningkatkan volume perdagangan, investasi swasta, dana bantuan, dan kredit, meskipun sekarang Indonesia bukan lagi negara berkembang. Disini pasar dengan aturan yang ketat dan kontrol negara atas pasar bebas tidak akan mendapatkan tempat. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta dari strategi ini adalah pertumbuhan daya beli masyarakat kelas atas yang berorientasi ke negara barat.

b. Tatanan baru perekonomian dunia

Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan negara berkembang ke dalam perekonomian dunia, tetapi perekonomian dunia dengan aturan yang berbeda, yaitu

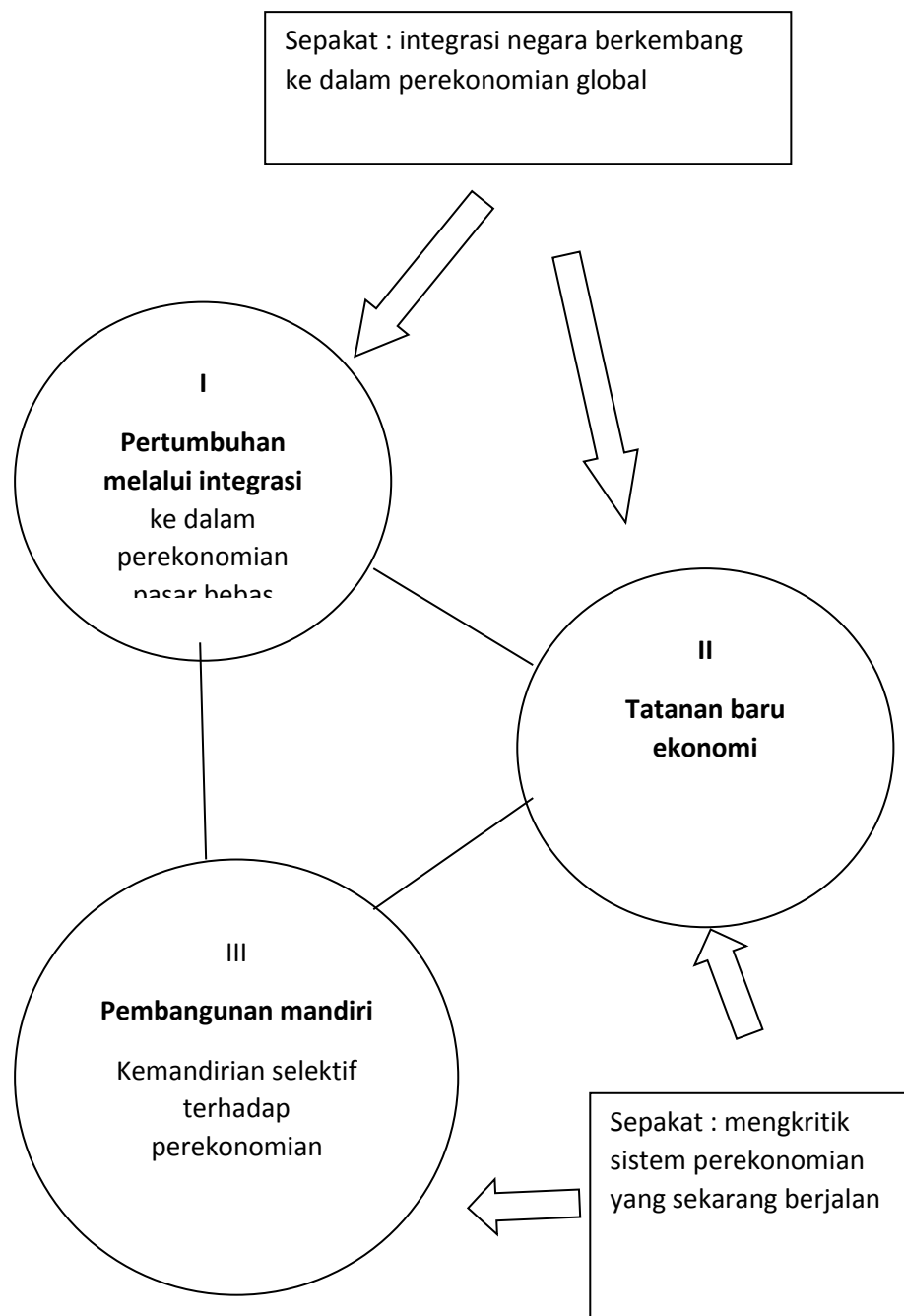
- 1) Harga bahan mentah harus stabil dan terjamin
- 2) Perusahaan multinasional harus tunduk pada aturan pemerintah
- 3) Cukai dan pembatasan perdagangan yang dilakukan negara barat harus ditiadakan

- 4) Dana bantuan harus ditingkatkan secara drastis
- 5) Kredit lunak harus dikembangkan

c. Pembangunan yang mandiri dan kemandirian yang selektif

Menurut konsep ketiga ini, pembangunan yang mandiri dapat dilaksanakan dengan bersandar pada kemandirian (*self-reliance*) dan kemandirian kelompok (*collective self-reliance*). Kemandirian yang selektif maksudnya adalah menciptakan pasar dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dengan jalan melindungi diri dari intervensi pasar global. Prioritas utamanya ditempati oleh produksi bahan pangan untuk pasar dalam negeri, dan bukan untuk ekspor.

Kerja sama ekonomi dengan negara industri juga perlu dikembangkan, namun dengan syarat hal ini membantu pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan memungkinkan pengembangan produksi bahan pokok. Modernisasi bukanlah hal yang tabu, namun teknologi harus dipilih sesuai dengan peluang ekonomi.



Gambar 2.2 Tiga strategi untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan

Sumber : Strahm, 1999

2.1.3 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah sendiri sudah menetapkan prioritas kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan, yaitu menjadi 8-10% pada akhir 2014 dengan 4 kluster program penanggulangan kemiskinan, antara lain :

1. Program Kluster I

Pada kluster I ini program penanggulangan kemiskinan dititikberatkan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Sasaran yang dituju adalah upaya melakukan pemenuhan hak dasar, pengangguran beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin guna memperbaiki kualitas kehidupan yang lebih baik. Penerimaan manfaat pada kluster I ini adalah kelompok masyarakat sangat miskin.

2. Program Kluster II

Pada program penanggulangan kemiskinan tahap ini adalah program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya memberikan bantuan langsung pada masyarakat miskin. Penerima manfaat dari kluster II ini adalah kelompok masyarakat dengan kategori miskin. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan bukan hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan

sumberdaya yang dimiliki, tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan daerah. karakteristik kluster II ini antara lain :

- a) Menggunakan pendekatan partisipatif, tidak hanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program namun juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
- b) Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkan.
- c) Pelaksanaan keolompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiriguna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.
- d) Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Yang hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

3. Program Kluster III

Pada program kluster II ini program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Penerima manfaat kluster ini adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Kluster ini mempunyai 3 karakteristik sebagai berikut :

- a) Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro
- b) Memperkuat kemandirian berwirausaha dan akses pada pasar
- c) Meningkatkan ketrampilan dan manajemen usaha

4. Program Kluster IV

Sedangkan pada kluster terakhir ini, program penanggulangan kemiskinan dengan mengadakan rumah murah, angkutan umum murah, air bersih dan listrik yang makin merata, serta peningkatan kehidupan nelayan dan masyarakat miskin perkotaan.

Supaya hasilnya maksimal, upaya pengentasan kemiskinan ini perlu dilakukan secara sinergi dalam empat kluster ini. Yang perlu diantisipasi adalah menghilangkan angka kemiskinan yang absolut sebanyak 3,2 juta orang. (Laksono, 2013:65-69)

Secara konseptual, Suyanto (2013 : 244:245) mengemukakan upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilakukan secara sepotong demi sepotong, parsial, dan hanya bersifat temporer. Dengan mengacu pada sejumlah isu prioritas kemiskinan, maka program-program intervensi yang dikembangkan harus benar-benar komprehensif. Bukan hanya pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek kerentanan, ketidakberdayaan, kelemahan jasmani, dan keterisolasian. Ini dapat diperjelas melalui model dan program penanggulangan kemiskinan dibawah ini.

Tabel 3.1 Model dan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Aspek-aspek	Masalah	Program
Kemiskinan	Tidak memiliki aset produksi dan berpenghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari	a. program padat karya b. bantuan peralatan usaha
Kerentanan	Tidak memiliki tabungan, mudah terperangkap hutang	a. bantuan tabungan b. Revitalisasi Takesra-Kukesra
Ketidakberdayaan	Mudah dipermainkan tengkulak atau pengijon, lemah posisi tawarnya dalam penentuan harga jual produk yang dihasilkan, kemampuan melakukan diversifikasi usaha lemah	a. Pelatihan keterampilan alternatif b. Pengembangan badan penyangga c. Perlindungan bagi masyarakat miskin
Keterisolasian	Tidak memiliki akses terhadap jaringan kerja dan modal usaha	a. Memfasilitasi pola hubungan kerja antara distributor dan usaha si miskin b. Bantuan modal usaha
Kelemahan jasmani	Sering sakit, dan	a. Asuransi kesehatan

implikasi sakit bagi keluarga miskin bukan sekedar harus mengeluarkan biaya berobat, tapi juga menanggung resiko hilangnya penghasilan karena tidak bekerja akibat sakit	b. Bantuan dana bagi keluarga miskin di musim paceklik
--	--

Semua program yang dibuat guna menjamin percepatan dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dibutuhkan beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Adanya kemudahan ekonomi yang benar-benar nyata, yaitu terciptanya peluang-peluang sosial yang memihak kepada para pelaku ekonomi rakyat. Peluang sosial inilah sebagai upaya meningkatkan akses terhadap fasilitas dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Meningkatkan peran lembaga-lembaga lokal serta klompok sekunder masyarakat sebagai upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
 - c. Menghindari kebijakan yang bersifat merito-kratis, yaitu keluarga atau warga miskin bukan hanya dibedakan berdasarkan penghasilan atau garis kemiskinan saja.
 - d. Perlu adanya perlindungan yang efektif bagi masyarakat miskin.
- Kemiskinan dan pemiskinan pada dasarnya terjadi sebagai akibat

dari proses eksploitasi atau pengambilan hak yang kurang adil dari milik orang miskin (Suyanto, 2013 : 246-249)

Kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dikategorikan dalam tiga kelompok besar, yaitu :

1) Kelompok Filantropis

Kelompok ini berkeyakinan bahwa mungkin untuk meningkatkan keadaan rakyat miskin melalui upaya kemanusiaan secara langsung, tanpa mengubah lembaga dan struktur yang ada. Ciri utama pandangan dan pendekatan programatik kelompok ini terletak pada kenyataan bahwa dengan mencoba memperbaiki kehidupan rakyat miskin dalam kerangka lembaga-lembaga dan struktur yang telah ada dengan cara yang didorong oleh pertimbangan kemanusiaan.

2) Kelompok Reformasi

Kelompok ini bekerja keras bagi berfungsinya sistem sosial dan kelembagaan yang ada secara sehat, atau paling jauh memperbaruinya. Ditekankan bahwa reformasi institusional akan dapat dihasilkan perbaikan diseluruh bidang kehidupan rakyat miskin. Ciri utamanya pandangan dan pendekatan programatik kelompok ini bahwa untuk meningkatkan kehidupan rakyat tidak perlu menggantikan sistem yang ada termasuk lembaganya, cukup dengan memperbaikinya sajar.

3) Kelompok Revolusioner

Kelompok ini berpandangan bahwa segala bentuk bantuan individual atau sumbangan kemanusiaan serta reformasi institusional tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan. (Suyanto, 2013 : 6-8)

Program-program penanggulangan kemiskinan juga merupakan upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dalam konteks yang lebih luas yaitu pembangunan manusia Indonesia yang selama ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Suatu instrumen yang oleh UNDP dikembangkan untuk mengklasifikasi tingkat kemajuan pembangunan antar negara, di Indonesia sendiri diolah oleh BPS dan dijadikan rujukan kemajuan pembangunan setiap daerah.

Untuk mendukung agenda pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam koordinasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) provinsi dilakukan dalam rangka mendorong suksesnya salah satu program penanggulangan kemiskinan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. (Laksono, 2013: 64)

Ada beberapa program PNPM Mandiri diantaranya :

a. PNPM Pedesaan

Merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Dalam teknik oprasional di lapangan, PNPM Mandiri Pedesaan menekankan prinsip pokok SIKOMPAK, yang terdiri dari :

- 1) Transparansi dan Akuntabilitas
- 2) Desentralisasi
- 3) Keberpihakan pada masyarakat miskin
- 4) Otonomi
- 5) Partisipasi masyarakat
- 6) Prioritas usulan
- 7) Kesetaraan dan keadilan Gender
- 8) Kolaborasi
- 9) Keberlanjutan
- 10) Demokratis

b. PNPM Perkotaan

Merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan

di perkotaan secara mandiri. Ada tiga tujuan program PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu :

- 1) Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai *universal* kemanusiaan
- 2) Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasaranan dan sarana, serta pendanaan (modal)
- 3) Mengedepankan peran Pemerintah Kota/Kabupaten agar semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemistraan dengfan masyarakat setemopat.

Diperkotaan, kehidupan sehari-hari masyarakat erat kaitannya dengan dimensi dari gejala kemiskinan dalam berbagai bentuk, seperti :

- 1) Dimensi Politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin
- 2) Dimensi Sosial, tidak terintegrasinya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada.
- 3) Dimensi Lingkungan, muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan
- 4) Dimensi Ekonomi, rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak

- 5) Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka

c. PNPM Peduli

Merupakan program baru yang bertujuan untuk melengkapi PNPM Mandiri dagang. PNPM Peduli akan memberikan dukungan untuk kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan dan pembangunan kapasitas serta pelatihan untuk memperkuat keorganisasian penerima hibah.

d. PNPM Pusaka

PNPM Pusaka merupakan pelestarian dan pengembangan pusaka (*heritage*) untuk pemberdayaan masyarakat mandiri, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan persatuan bangsa. PNPM Pusaka bertujuan untuk mengajak semua pihak mengenali, mencintai, dan mendayagunakan pusaka, baik pusaka alam, budaya, maupun saujana (Laksono, 2013: 73-90)

2.1.4 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemsikininan Daerah (TKPKD) Kota Semarang

Pentingnya pemerintah bermula dari adanya fakta bahwa sistem nilai berubah, dan nilai yang satu seringkali konflik dengan nilai yang lain. Hubungan tersebut memunculkan pihak yang satu merasa dirugikan sementara pihak lain diuntungkan. Oleh karena itu, diciptakan berbagai lembaga sosial yang diharapkan dapat menjamin agar tidak ada yang

saling merugikan kepentingan. Nilai pemerintahan merupakan salah satu nilai yang digunakan untuk menegakan aturan, yaitu kekuatan (*power*) . pemerintah dalam konsep pemerintah daerah dapat diartikan sebagai pengguna kekuasaan masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya (Ndara, 2003 : 69-74)

Menurut Perda kota Semarang Nomor 4 tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 Ayat 4, Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah dalam lingkup ini adalah pemerintah daerah Kota Semarang yang khusus menanggulangi kemiskinan, yaitu TKPKD. TKPKD dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/0320/2010 tanggal 2 September 2010 sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah dan bertaqnggung jawab kepada Walikota.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dibentuk dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinyang terdiri dari Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya. Dasar hukum pembentukan TKPKD adalah sebagaiberikut :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsidan Kabupaten / Kota.

- 2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.
- 3) Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/146/2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/0320/2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang Dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang

TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sebagai kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setiap pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah

provinsi, kabupaten, dan kota serta mempunyai wakil. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan kepada masyarakat.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan :

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Dekonsetrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

<http://www.seputarpendidikan.com/2014/08/asas-asas-otonomi-daerah-beserta.html?m=1>

Sedangkan menurut Setiawan (2014:14-17) pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagai dimaksud dalam UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya banyak persoalan publik yang membutuhkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, salah satunya dengan adanya peraturan daerah (Perda).

Posisi pemerintah sebagai bagian integral yang-diperintah mengandung implikasi metodologik. Pada gilirannya pemerintah adalah konsumen produknya sendiri (Ndraha, 2003 : 36).

2.1.5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah sebagai berikut :

“Peraturan daerah provinsi atau nama lainnya dan peraturan daerah kabupaten/kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di bagi dalam dua pengertian, yakni :

- a. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Setiawan (2014:17) Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah sebagai wujud dari kekuatan hukum dan kodiror yang baik dalam menjalankan kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan yang hakiki.

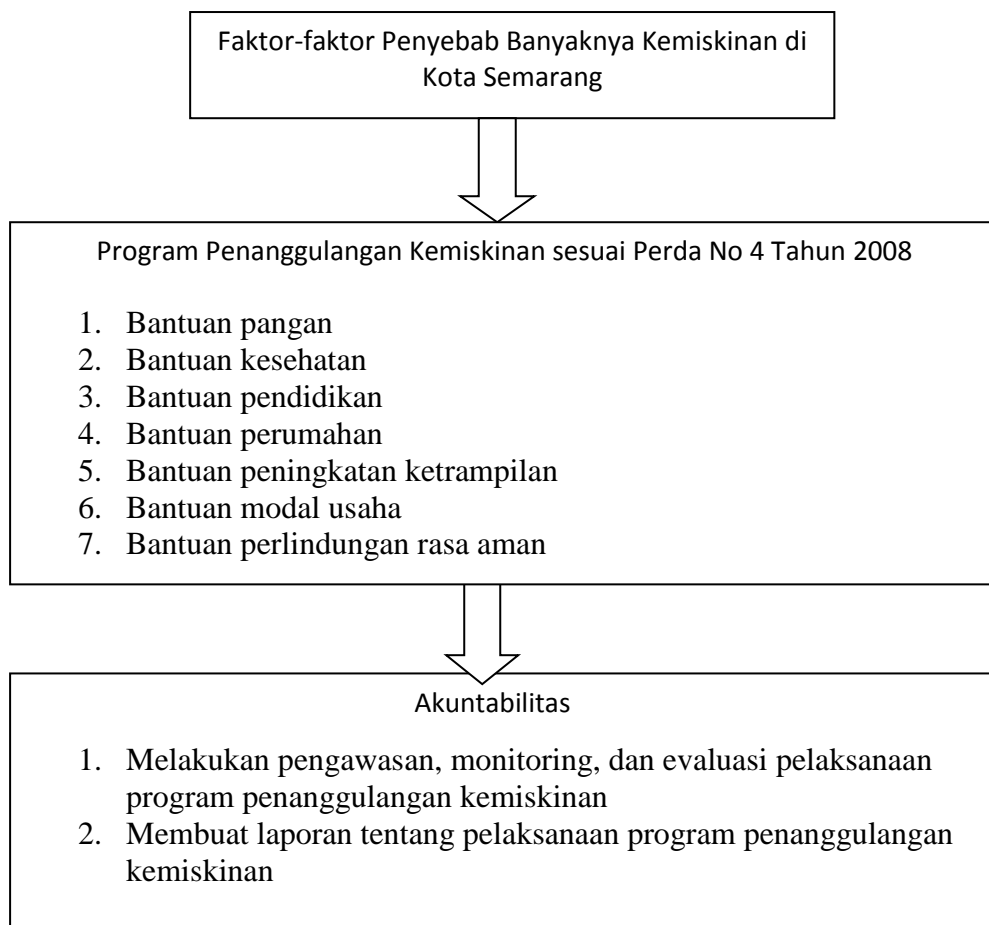
Peraturan daerah (Perda) kabupaten/kota dibuat oleh Wali Kota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai wujud dari adanya aturan hukum yang dibuat terkait dengan kebijakan pemerintah.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 adalah Peraturan Daerah Kota Semarang yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan bagian yang memaparkan dimensi-dimensi kajian utama, faktor-faktor kunci dan hubungan-hubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi dan grafis. Untuk menghadapi perkembangan ekonomi yang begitu pesat, tentu dibutuhkan masyarakat yang mempunyai kualitas hidup yang sejahtera serta mampu bersaing dengan

masyarakat internasional. Kesenjangan ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya kemiskinan yang ada di sebuah daerah. Masalah ini diperbaiki secara menyeluruh oleh pemerintah diikuti dengan kemampuan dalam menyusun tatanan kehidupan masyarakat yang baik.



Kota Semarang merupakan Ibu Kota provinsi Jawa Tengah dengan permasalahan yang kompleks, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan di Kota Semarang cukup tinggi yang tersebar di 16 Kecamatan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan. Serta membentuk suatu tim sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab pada Walikota, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang.

TKPKD bertugas untuk melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penyusunan program TKPKD lebih terperinci, akan tetapi garis besar program tetap sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2008.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya pengkajian tentang fenomena yang sedang diteliti. Bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar berada didalam lokasi yang dituju. Penelitian ini berlokasi di kantor TKPKD Kota Semarang gedung Balaikota lantai 7, Jalan Pemuda Nomor 148 Kota Semarang . Peneliti memilih lokasi tersebut karena pemerintah Kota Semarang khususnya TKPKD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu, dari pemerintah kota Semarang itu sendiri peneliti dapat memperoleh hasil yang diinginkan terkait penanggulangan kemiskinan tersebut sudah berhasil atau belum.

3.2 Fokus Penelitian

Guna membatasi luasnya penelitian ini maka digunakan fokus penelitian. Setiap penelitian pasti memiliki orientasi teorinya sendiri yang berhubungan dengan pengetahuan sebelumnya ataupun berdasarkan pengalaman (Moleong, 2002 :78). Fokus penelitian merupakan pokok penelitian yang diperuncing lagi lingkupnya. Peneliti memiliki fokus penelitian dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap program pemerintah kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu :

a. Faktor penyebab banyaknya masyarakat miskin di kota Semarang

Faktor yang menyebabkan di Kota Semarang banyak warga miskin, pada fokus penelitian faktor-faktor penyebab kemiskinan berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang (TKPKD Kota Semarang)

b. Upaya yang dilakukan oleh TKPKD Kota Semarang dalam penanggulangan kemiskinan sesuai perda No 4 Tahun 2008

- 1) Bantuan Pangan contoh Raskin (Beras miskin)
 - 2) Bantuan Kesehatan contoh berobat di puskesmas Gratis bagi warga miskin
 - 3) Bantuan Pendidikan contoh pembebasan biaya masuk sekolah pada SD sampai SMA
 - 4) Bantuan Perumahan contoh penyediaan perumahan rakyat
 - 5) Bantuan Peningkatan Ketrampilan contoh bimbingan pengelolaan/manajemen usaha bagi yang punya usaha seperti UMKM
 - 6) Bantuan Modal Usaha contoh pinjaman dana bergulir bagi masyarakat yang mau membuka usaha
 - 7) Bantuan Perlindungan Rasa Aman contoh pengurusan administrasi kependudukan yang lebih mudah
- b. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) TKPKD Kota Semarang dalam penanggulangan kemiskinan sesuai Perda No 4 Tahun 2008 di Kota Semarang

- 1) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
- 2) Membuat laporan tentang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

3.3 Sumber data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Menurut Moleong (2007:4), sumber data kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen, sumber data lainnya. Adapun sumber data penelitian ini adalah:

a. Sumber Data primer

Data primer yaitu kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam video atau audio tape, pengambilan foto atau film (Moleong, 2007:157).

(Kaelan, 2005:148) Sumber primer adalah buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan obyek material penelitian, sumber data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian di lapangan. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pemerintah kota semarang bagian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang

1) Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi guna mendapatkan pemecahan masalah yang diajukan. Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Kasubbid perencanaan pembangunan Kota Semarang (Anggota TKPKD), staff bidang perencanaan pembangunan Kota Semarang (Anggota TKPKD), seksi bidang pelayanan masalah kesejahteraan masyarakat Kota Semarang (Anggota TKPKD), warga miskin RW 07 Kelurahan Tembalang, Kota Semarang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh dengan cara tidak langsung. Sumber data sekunder merupakan catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal (Kaelan, 2005:65). Untuk melengkapi sumber data primer digunakan sumber data tambahan yang berupa dokumen serta arsip yang terdapat kantor tersebut. Dilihat dari sumber data, data sekunder dapat diperoleh dari:

1) Sumber tertulis

(Moleong, 2007:159) menurutnya sumber tertulis terdiri dari sumber buku dan majalah ilmiah, baik cetak maupun elektronik, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini meliputi arsip TKPKD tentang banyaknya warga miskin, program penanggulangan kemiskinan, Pelaksanaan Gerdu Kempling Tahun 2014 termasuk didalamnya sebagai laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Tahun 2014, SK Walikota

465/0320/2010serta dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

2) Foto

Ada dua kategori foto yang dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif yaitu foto yang dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan oleh penelitian sendiri (Bogdan dan Biklen dalam Moloeng, 2004:160). Peneliti juga merekam hasil penelitian dalam bentuk foto-foto mengenai warga miskin kota Semarang menggunakan kamera digital dan alat komunikasi iPad atau tablet dan dokumentasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah dari TKPKD.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka penelitian, penelitian disamping menggunakan metode pengumpulan yang tepat juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpulan data yang relevan (Rachman, 1999:71). Untuk menjawab permasalahan penelitian maka diperlukan pengumpulan data sebanyak mungkin dan informasi mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog antara pewawancara dengan narasumber atau responden untuk memperoleh informasi seakurat mungkin. Dengan kata lain, wawancara untuk merekam data-data lisan yang dituangkan kedalam bentuk tulisan yang berfungsi sebagai data

penting untuk bahan analisis. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data secara langsung dari informan, dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:186). Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara dapat dikembangkan apabila dianggap perlu mendapat informasi yang lebih lengkap. Dalam wawancara diharapkan terjadi hubungan baik antara pewawancara dengan informan sehingga menghasilkan data yang valid, lengkap dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang
- 2) Seksi pelayanan sosial bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 3) Warga miskin kota Semarang

Peneliti juga menggunakan alat pengumpulan data yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kepala dan wakil kepala bagian penanggulangan kemiskinan kota Semarang tersebut. Dengan teknik wawancara ini diharapkan peneliti dapat memperoleh data

tentang akuntabilitas pemerintah kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 tahun 2008 di kota Semarang

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dsb (Arikunto, 2006:231). Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil wawancara. Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan mencari, menemukan dan mengumpulkan catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi dapat juga diartikan sebagai pengumpulan data dengan jalan mengambil keterangan secara tertulis dari tempat penelitian. dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu arsip-arsip, dokumen-dokumen, maupun rekaman kegiatan/aktifitas dari pihak-pihak terkait mengenai kerja TKPKD dalam menanggulangi kemiskinan Kota Semarang.

3.5 Validitas Data Penelitian

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjuka tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuai dengan instrumen. Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006:168)

a. Perpanjangan keikutsertaan

Sebagaimana sudah dikemukakan, peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai semua yang dibutuhkan dalam pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi:

- 1) membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks
- 2) membatasi kekeliruan (*biases*) peneliti
- 3) mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat (Moleong, 2007:327)

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Moleong, 2007:330).

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi;

(3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong 2007:330).

Berdasarkan penjelasan teori tersebut diatas, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah dengan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yaitu :

i. Membandingkan data hasil wawancara

Penulis membandingkan data hasil wawancara mengenai akuntabilitas pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008 yang dilaksanakan oleh TKPKD Kota Semarang melalui data yang diperoleh secara tertulis dengan melaksanakan program yang dirasakan oleh warga miskin. Menurut Bapak Sri Hartono selaku anggota TKPKD Kota Semarang, dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kota Semarang yaitu TKPKD telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan program. Hal ini diperkuat oleh Ibu Rukhinah selaku warga RW 07 dan Ibu Gampang selaku warga miskin penerima bantuan, bahwa pemerintah Kota Semarang memang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Hasil

perbandingan antara kedua informan dari hasil wawancara sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

- ii. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang seperti orang pemerintahan, warga biasa, dan warga miskin.

Penulis membandingkan pandangan beberapa informan dari berbagai kalangan mengenai Akuntabilitas Pemerintah Kota Semarang Dalam Menanggulangi Kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008. Penulis mewawancarai Bapak Sri Hartono selaku staff kesekretariatan TKPKD, Ibu Sulamatul selaku staff TKPKD, Bapak Johanes Adhi selaku staff TKPKD, Bapak Adi Pratondo selaku seksi pelayanan sosial bidang penyandang masalah kesejahteraan sosial, Ibu Rukhinah selaku warga biasa RW 07 Kelurahan Tembalang, serta Ibu Gampang, Ibu Yatemi, Bapak Tarjo, Bapak Parjono, dan Bapak Yudi selaku warga miskin di Kota Semarang khususnya di RW 07 Kelurahan Tembalang. Hasil perbandingan antara data wawancara dengan informan yang berbeda-beda hampir semuanya sama atau sesuai dengan yang ada di lapangan.

- iii. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2008 : 331)

Penulis membandingkan informasi secara dokumen atau arsip dari Bapak Sri Hartono dan informasi lisan warga miskin RW 07 Kelurahan Tembalang mengenai Akuntabilitas Pemerintah Kota

Semarang Dalam Menanggulangi Kemiskinan Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008. Hasil perbandingan antara hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan hampir semuanya sesuai dengan yang ada di lapangan. Triangulasi data dengan memanfaatkan penggunaan sumber inilah yang membantu peneliti mendapatkan data yang valid.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam Moleong 2007:248 Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain, menurut Bagdan dan Biklen.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah lebih lanjut secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta mengumpulkan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Milles dan Huberman yang meliputi: pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2007:20).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan. Dari hasil wawancara adalah mengenai Akuntabilitas Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan. Dari studi dokumentasi yang dilakukan, peneliti memperoleh data berupa arsip maupun foto yang terkait dengan penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini menjalankan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan serta studi dokumentasi di lapangan, data yang diperoleh peneliti menggolongkan

dan mengarahkan sesuai fokus penelitian yaitu mengenai gambaran umum penanggulangan kemiskinan di kota Semarang sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008.

c. Penyajian data

Penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu diadakan penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles 1992:17).

Data yang direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi naratif berdasarkan aspek dan penelitian. Penyajian data dimaksudkan guna memudahkan peneliti menafsirkan data maupun untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif naratif yang berisi tentang uraian seluruh masalah yang dikaji sesuai dengan fokus penelitian yaitu Akuntabilitas Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008. Selain itu data juga disajikan dalam bentuk gambar dan tabel.

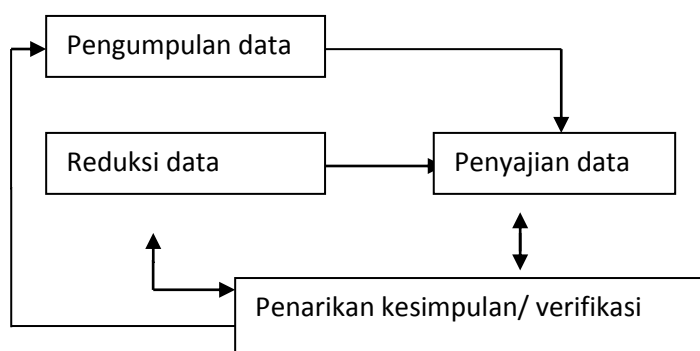
d. Penarikan kesimpulan

Data-data hasil penelitian setelah direduksi, disajikan langkah terakhir yaitu diadakan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil

dari data-data yang telah didapatkan dari laporan penelitian, selanjutnya digabungkan dan disimpulkan serta diuji kebenarannya. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan, sehingga kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai suatu bagian konfigurasi yang utuh (Miles, 1992:17).

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka dalam penyimpulan data peneliti menggunakan teknik induktif. Yang mengambil dengan berdasar fakta-fakta yang ada di lapangan secara khusus yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Sehingga membentuk suatu kesimpulan yang baru, utuh dan saling terkait satu dengan yang lain.

Adapun alur dari kegiatan tersebut jika digambarkan dengan skema adalah sebagai berikut:



Sumber: Milles (1992:20)

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan dirasa sudah cukup maka diadakan reduksi data, didukung juga dengan pengumpulan data yang digunakan untuk penyajian data. Setelah tiga tahapan tersebut dilakukan, maka diambil kesimpulan atau verifikasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab kemiskinan disebabkan karena rendahnya pendidikan, kurangnya ketrampilan, tidak adanya faktor produksi, dan cacat fisik atau berkebutuhan khusus yang berdampak pada banyaknya warga miskin di Kota Semarang
2. Program penanggulangan kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008 berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan setiap tahun sebesar 2% di Kota Semarang. Hal ini dilihat pada data dari TKPKD tentang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Gerdu Kempling tahun 2014 dengan target penurunan angka kemiskinan sebesar 2% pertahun.
3. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) TKPKD dengan cara evaluasi dan monitoring program penanggulangan kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008 berpengaruh pada peningkatan kedisiplinan dalam melaksanakan program. Selain itu, evaluasi dan monitoring memberikan manfaat sebagai masukan kepada Pemerintah (TKPKD) Kota Semarang terkait sukses atau belum program yang dicanangkan oleh pemerintah. Serta dapat dijadikan acuan bagi

4. program-program tahun berikutnya. Dengan demikian maka evaluasi dan monitoring sebagai wujud dari pemerintahan yang mampu bertanggungjawab pada tugas dan wewenangnya khususnya dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah (TKPKD) Kota Semarang merupakan tim bentukan pemerintah yang bisa bertanggungjawab pada masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan mulai dari verifikasi database warga miskin, penyusunan program penanggulangan, pelaksanaan program penanggulangan, serta evaluasi dan monitoring hasilpelaksanaan program. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa semakin pemerintah dapat melaksanakan kebijakan penanggulngan kemiskinan dan rirasakan oleh masyarakat, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

5.2 Saran

Atas dasar kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dapat diberikan beberapa saran dan diharapkan dapat berguna bagi pemerintah maupun agen pembangunan dimasa yang akan datang. Adapun saran tersebut adalah :

1. TKPKD harus terus menjalankan program yang sudah berhasil dilaksanakan dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang, serta menambah program-program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan seperti pemberian bantuan pendidikan luar sekolah bagi anak jalanan.
2. Bagi LSM, Perguruan Tinggi, Sektor Swasta, dan Tokoh masyarakat harus bisa meningkatkan keikutsertaan dalam memonitoring pemerintah melaksanakan penanggulangan kemiskinan Kota Semarang, tidak hanya membantu secara pembiayaan. Agar kesuksesan penanggulangan kemiskinan Kota Semarang terus meningkat.
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah harus terus berupaya dalam penyusunan program dan pemantauan pelaksanaan program dimasing-masing dinas maupun badan pemerintahan, agar penanggulangan kemiskinan benar-benar dilaksanakan sesuai program dan jangka waktu yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd'rachim, E.A. 2009. *Kemiskinan dan Pengangguran*. Jakarta : Nobel Edumedia
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Malang : SETARA Press
- Huberman, Micheal, dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan (catatan pertama)*. Yogyakarta : YKPN
- Laksono, Agung R. 2013. *Menuju Indonesia Emas (Gerakan Bersama Mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur, Dan Sejahtera)*. Hal 55-94. Jakarta : kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (MenKoKesRa)
- Lukito, Penny Kusumastuti. 2014. *MEMBUMIKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKTOR PUBLIK : Tantangan Berdemokrasi Kedepan*. Jakarta : GRASINDO
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- . 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- . 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndhara, Talizidulu . 2003 . *KYBERNOLOGY Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT RINEKA CIPTA
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Kota Semarang Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan Walikota No.18c Tahun 2009 tentang indikator, kriteria dan klasifikasi warga miskin Kota Semarang tahun anggaran 2009.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014

Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral dalam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, Tindakan, dan Pengembangan*. Semarang: Unnes Press.

Remi, Sutiyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002 . *KEMISKINAN DAN KETIDAKMERATAAN DI INDONESIA (Suatu Analisis Awal)*. hal 34. Jakarta : RINEKA CIPTA

Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah, Kerangka, Standar, dan Metode*. Surabaya : Aksara Satu

Setiawan. 2014. *Sekilas Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. hal 14-17. Surakarta : CV Aryhaeko Sinergi Persada

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 465 / 146 / 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 465 / 0320 / 2010

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 465 / 206 / 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 465 / 00320 / 2010

Suyanto, Bagong. 2013. *ANATOMI KEMISKINAN dan STRATEGI PENANGANANNYA (Fakta Kemsikinan Masyarakat Pesisir, Kepulauan, Perkotaan, dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia)*. Malang : INTRANS Publishing

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Internet

<http://www.pemosbudsimgakin.Semarangkota.go.id>

<http://Simgakin.semarangkota.go.id>

<http://Semarangkota.go.id>

<http://www.seputarpendidikan.com/2014/08/asas-asas-otonomi-daerah-beserta.html?m=1>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN SESUAI PERDA
NOMOR 4 TAHUN 2008 DI KOTA SEMARANG**

No	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Indikator	Pertanyaan	Teknik Pengumpulan Data	Subjek Penelitian
1.	Apakah yang menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat miskin di Kota Semarang?	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> Faktor penyebab banyaknya masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> Apakah yang menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat miskin di Kota Semarang? 	<ul style="list-style-type: none"> Wawancara Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> Tan Kondisi Penanggulangan Kemiskinan Dataran Sekolah Bidang Perencanaan

2.	Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008?	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan wawasan tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Semarang 	<ul style="list-style-type: none"> Program penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Apa yang menjadi penyebab utama masyarakat memerlukan kebutuhan hidup? Apa yang menjadi penyebab di antara itu? Saudara dapat dalam memenuhi kebutuhan hidup? Bagaimana bentuk program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang?
----	---	--	---	--

		<p>dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Semarang? • Siapa saja yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan? • Apakah program... 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui
--	--	---	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Upaya Penanggulangan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah Bapak/Ibu/Saudara benar-benar melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang dibuat pemerintah Kota Semarang? • Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan? • Apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut? • Apakah... 	
--	--	--	---	---	--

menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008 di Kota Semarang ?	(akuntabilitas) pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008	dalam menanggulangi kemiskinan sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008 ?
		<ul style="list-style-type: none"> • Seperti apa monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ? • Apakah ...

			<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana membentuk aparat pemerintah yang punya akuntabilitas tinggi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang ? • Apakah dengan ada nya Perda Nomor 4 Tahun 2008 mengakibatkan arah dan tujuan pemerintah dalam penanggulangan ...
--	--	--	--

			<p>kemiskinan ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah dampak positif dan negatif bagi pemerintah dengan adanya perda khusus penanggulangan kemiskinan ? • Apakah dampak positif dan negatif bagi Badan This Sejahtera dengan adanya perda khusus penanggulangan kemiskinan ?
--	--	--	--

Lampiran 2

Hasil Wawancara

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Kota Semarang

Nama : Sri Hartono

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 55 Tahun

Alamat : Kantor Balai Kota, Jl Pemuda No 148 Semarang

Pekerjaan : Kasibud Perencanaan Pemerintahan Bappeda Kota
Semarang

Hari / tanggal : Kamis, 20 Agustus 2015

Saya :

Selamat pagi pak, saya Shellika yang dari Unnes. Kalau tidak mengganggu saya ingin bertukar informasi dengan pak Sri ?

Sri Hartono :

Oh iya mbak shelly, silahkan duduk. Mudah-mudahan saya bisa membantu.

Saya :

Begini pak, kemiskinan di Kota Semarang kan cukup menjadi masalah serius yang harus di tangani pemerintah. Yang saya tahu pemerintah mempunyai kebijakan penanggulangan kemiskinan, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penanggulangan kemiskinan. Itu betul pak ?

Sri Hartono :

Ya memang betul mbak, Perda Nomor 4 Tahun 2008. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 merupakan landasan hukum dari penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang. Perda tersebut dijadikan tumpuan atau arahan untuk membuat program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Sehingga dalam penyusunan dan pelaksanaan programnya diharapkan efektif dan efisien baik ke warga miskin maupun pengelolaan sumber dana yang ada.

Saya :

Jadi aturannya jelas njih pak ?

Sri Hartono :

Iya mbak, Perda dibuat kan untuk memperjelas kebijakan. Serta mempunyai kekuatan hukum. Sehingga pemerintah yang menjalankannya punya ikatan aturan yang kuat.

Saya :

<p>Didalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 kan berisi program penanggulangan pak. Itu dilaksanakan semua pak ?</p>
<p>Sri Hartono :</p> <p>Di Perda tersebut kan memaparkan garis besar program, kemudian program-program diperinci sesuai sasaran. Nanti yang melaksanakan itu masing-masing dinas atau badan pemerintah sesuai bidangnya.</p>
<p>Saya :</p> <p>Seperti adanya Gerdu Kemplin itu pak, kan di Perda tidak ada. Berarti itu seperti program yang diperjelas dari program yang ada didalam Perda pak ?</p>
<p>Sri Hartono :</p> <p>Betul mbak, Gerdu Kempling itu program penanggulangan kemsikinan. Sebagai pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2011 TKPKD Kota Semarang membentuk Gerdu Kempling yaitu gerakan terpadu di bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur, dan Lingkungan. Itu dibentuk supaya mempercepat penanggulangan kemiskinan</p>
<p>Saya :</p> <p>Kemudian dari pelaksanaan program-program tersebut, ada kendalanya atau tidak pak ?</p>
<p>Sri Hartono :</p>

Kendala itu pasti ada, namanya saja kita mengurus berbagai program untuk berbagai keinginan atau kebutuhan masyarakat mbak. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian pelaksanaan program biasanya karena biaya dan keikutsertaan masyarakat. Seperti misalnya ada biaya untuk program A namun masyarakatnya kurang semangat dalam ikut andil aktif. Sementara masyarakatnya membutuhkan program B namun pemerintah perlu menyiapkan anggaran dan biasanya masukan tersebut dijadikan PR untuk pembuatan program berikutnya.

Saya :

Pak, Perda Nomor 4 Tahun 2008 juga menjelaskan kalau pemerintah membuat laporan serta melakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan. Betul pak ?

Sri Hartono :

Iya mbak, dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan, setiap akhir tahun laporan dibuat dan dikumpulkan dari masing-masing dinas. Ini dilakukan sebagai monitoring dan evaluasi hasil dari pelaksanaannya.

Saya :

Bentuk laporannya itu seperti apa pak ?

Sri Hartono :

Laporannya ya berisi kegiatan, foto-foto saat pelaksanaan program.

Kemudian nanti hasilnya bersama-sama dievaluasi sudah berhasil atau belum. Kemudian juga melakukan tinjauan program yang belum terlaksana ditahun ini apa, diakibatkan karena apa.

Saya :

Kalau boleh, saya ingin tau laporan tertulisnya pak ? pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan gerdu kempling itu.

Sri Hartono :

Wah laporan tiap tahun itu ada diarsip Bappeda, kalau yang tahun 2015 kan belum tutup tahun jadi belum ada laporannya. Kalau yang 2014 ada, saya berikan power point yang untuk presentasi laporan tahun 2014 ya mbak. Isinya sama saja, ada jumlah warga miskin, program, kemudian dana-dana sama foto pas kegiatan.

Saya :

Njih pak tidak apa-apa, terimakasih banyak pak atas informasi yang diberikan. Semoga dapat membantu kelancaran skripsi saya. Kalau grafik warga miskin sama pak Jo njih pak ?

Sri Hartono :

Ya mbak sama-sama, semoga cepat wisuda. Benar sama pak Jo itu.

Hasil Wawancara

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Kota Semarang

Nama : Sulamatul F

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 35 Tahun

Alamat : Kantor Balai Kota, Jl Pemuda No 148 Semarang

Pekerjaan : Staff Bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial Budaya
Bappeda

Kota Semarang

Hari / tanggal : Kamis, 20 Agustus 2015

Saya :

Permisi buk, yang saya tahu pemerintah Kota Semarang mempunyai Tim tersendiri khusus untuk menangani penanggulangan kemiskinan buk ?

Sulamatul :

Ya ada mbak, namanya TKPKD Kota Semarang. Itu Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang.

Saya :

Berarti TKPKD itu terstruktur bu ? seperti dinas atau badan pemerintah lainnya ?

Sulamatul :

Sebenarnya struktur resmi TKPKD itu tidak ada. Semua staff TKPKD diambil dari staff Bappeda dan dinas-dinas yang ditunjuk. Kalau koordinator utama TKPKD atau ketuanya ya bapak wali kota. Namun sebagai kepanjangan tangan beliau staff TKPKD di Bappeda Kota Semarang itu bapak Sri Hartono selaku anggota sekretariat TKPKD

Saya :

Bisa dikatakan TKPKD ada di dalam Bappeda njih bu. Bu beralih ke masalah pokok tentang kemiskinan masyarakat Kota Semarang. Apa saja sih yang menyebabkan banyaknya warga miskin di Kota Semarang bu ?

Sulamatul :

Penyebab di Kota Semarang cukup banyak warga miskin itu karena faktor seperti warga miskin tidak punya ketrampilan usaha yang bisa menghasilkan uang, akhirnya hanya bisa menganggur. Kemudian berdampak penangguran semakin banyak, jika penangguran banyak maka seringkali tidak mampu membiayai anak-anak untuk sekolah yang tinggi. Jadi penyebabnya

<p>kebanyakan saling berkaitan dari satu faktor menjalar ke faktor-faktor lainnya</p>
<p>Saya :</p> <p>Untuk menangani banyaknya warga miskin itu bagaimana bu ?</p>
<p>Sulamatul :</p> <p>Pemerintah kan mempunyai program-program penanggulangan kemiskinan mbak yang tersebar di masing-masing dinas untuk pelaksanaannya. Ya programnya tidak jauh dari Perdana mbak, Nomor 4 Tahun 2008 itu tadi. Untuk program saya berikan pemaparan lewat soft file saja ya mbak soalnya cukup banyak.</p>
<p>Saya :</p> <p>Njih bu terimakasih bu, berarti TKPKD atau Bappeda itu hanya menyusun program dan yang menjalankan itu dinas bu ?</p>
<p>Sulamatul :</p> <p>Iya mbak, TKPKD itu memverifikasi data warga miskin lalu membuat program. Kalau verifikasi data warga miskin itu sama mas Jo, kalau program saya.</p>
<p>Saya :</p> <p>Setiap staff mempunyai tugas sendiri-sendiri njih bu ? setelah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2008</p>

kan pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi. Berarti membuat laporan kegiatan seperti itu bu ?

Sulamatul :

Secara resmi perintah untuk membuat laporan si tidak ada. Ini inisiatif pemerintah agar tahu hasilnya. Dan benar-benar melaksanakan program atau tidak. TKPKD atau lebih luas lagi Bappeda hanya membuat laporan agar tidak tumpang tindih pelaksanaan program antar dinas-dinas yang terkait.

Saya :

Bu, terimakasih atas informasi yang diberikan bu.

Sulamatul :

iya mbak, sama-sama.

Hasil Wawancara

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Kota Semarang

Nama : Johanes Adhi Nugroho

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 31 Tahun

Alamat : Kantor Balai Kota, Jl Pemuda No 148 Semarang

Pekerjaan : Staff Bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial Budaya

Bappeda

Kota Semarang

Hari / tanggal : Kamis, 20 Agustus 2015

Saya :

Permisi pak Jo, saya shellika yang mau menanyakan jumlah warga miskin Kota Semarang, tadi sudah ketemu pak Sri nya pak.

Johanes Adhi :

Oh ya silahkan mbak.

Saya :

Pak sebenarnya dari program penanggulangan kemiskinan itu, target sasarannya warga miskin yang seperti apa pak ?

Johanes Adhi :

Kalau kami itu menggolongkan tiap-tiap kategori mbak, biar lebih gampang mengurus atau mendatanya.

Saya :

Kalau menurut Perda Nomor 4 Tahun 2008 siapa saja pak sasarannya ? kan saya ini mengangkat Perdanya, namun di Perda hanya dijelaskan garis besarnya saja pak.

Johanes Adhi :

Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008 itu mempunyai tiga sasaran, yatu warga rawan / hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Tentunya setiap kategori tersebut di golongkan agar pemerintah lebih mudah mengetahui tingkat kemiskinan masyarakat

Saya :

Begitu pak, jadi kebutuhan tiap kategori tadi itu ya berbeda-beda pak ?

Johanes Adhi :

Ya iya mbak, kategori miskin seperti apa kemudian yang dibutuhkan apa

saja. Trus kalau rawan miskin apa, sangat miskin apa.
Saya : Kalau begitu saya boleh minta data warga miskinnya pak ?
Johanes Adhi : Boleh, saya copykan soft filenya. Ini grafik tiga kategori tadi dari tahun 2009 sampai 2015. Kalau database kan setiap 2 tahun sekali mbak.
Saya : Kalau data nama-namanya pak ?
Johanes Adhi : Itu tidak bisa ke pihak luar mbak, kan rahasia. By name itu ga erani saya kasih keluar.
Saya : Njih pak, kalau gitu makasih atas informasinya pak.
Johanes Adhi : Iya mbak monggo-monggo, sama-sama mbak.

Hasil Wawancara

Seksi Pelayanan Sosial Staff Bidang Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Kota Semarang

Nama : Adi Pratondo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 40 Tahun

Alamat : Kantor Balai Kota, Jl Pemuda No 148 Semarang

Pekerjaan : Seksi Pelayanan Sosial Staff Bidang Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Kota Semarang

Hari / tanggal : Jumat, 21 Agustus 2015

Saya :

Permisi pak, seperti kita tahu kan Kota Semarang angka kemiskinan cukup tinggi. Untuk itu pemerintah Kota Semarang mencanangkan penanggulangan kemiskinan, selain itu juga ada Perda yang mengaturnya yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2008. Bagaimana pendapat bapak ?

Adi Pratondo :

Ya memang angka kemiskinan di Kota Semarang sendiri cukup banyak, ini tersebar di 16 kecamatan mbak. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan, landasannya ya Perda itu tadi mbak Nomor 4 Tahun 2008.

Saya :

Sebenarnya pak, kalo dilihat dari penyebab atau faktor-faktor penyebabnya banyaknya masyarakat miskin itu apa pak ? rata-rata dari mereka.

Adi Pratondo :

Warga miskin kalau kita lihat sebagian besar karena tidak bekerja dan berpendidikan rendah sehingga jika ada lapangan pekerjaan dengan minimal pendidikan mereka tidak memenuhi syarat. Sementara kalau yang sudah berumur rata-rata tidak punya inisiatif atau ketrampilan produksi yang bisa menopang kebutuhan mereka

Saya :

Jadi seperti tidak punya pilihan untuk menaikkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik lagi ya pak. Kalau dari dinas sosial sendiri, program apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan pak ?

Adi Pratondo :

Seperti dinas-dinas lainnya, dari Seksi Pelayanan Sosial Staff Bidang Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Semarang sendiri

mempunyai program. Tentunya penanganan utama kami tentang kesejahteraan rakyat. Program yang kami berikan seperti bantuan modal usaha dan pelatihan. Contohnya bantuan bidang boga maka diberikan peralatan masak dan pelatihan membuat hasil boga tersebut agar bisa mengembangkan usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat

Saya :

Berarti bisa dikatakan pemberian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan mereka ya pak. Hasil-hasil produksi tadi itu misalnya, kemudian diapakan pak sehingga jadi tambahan pendapatan mereka ?

Adi Pratondo :

Ada yang dijual, atau kita ikutkan pameran-pameran di acara yang pemerintah kota selenggarakan. Kan biasanya ada acara pameran hasil daerah itu mbak, nanti ditampilkan seperti hasil makanan, atau kerajinan tas, batik, hiasan dinding.

Saya :

Sebetulnya cukup memberikan peluang usaha kalo benar-benar ditekuni ya pak. Dari pelaksanaan program-program tersebut mengalami kendala atau lancar-lancar saja pak ?

Adi Pratondo :

Ada mbak kendala-kendalanya.

Saya :

Apa saja pak kendalanya ?

Adi Pratondo :

Terkadang kendalanya itu masyarakat ada yang kurang aktif dalam berpartisipasi. Seperti ada warga miskin tidak di data, warga miskin tersebut tidak ada koordinasi dengan kelurahan, dan ada juga warga miskin yang tidak mau di data. Ini menjadikan kendala dalam melaksanakan program sesuai sasaran

Saya :

Bisa dikatakan sukses / tidaknya program bukan hanya dari pelaksanaan programnya saja ya pak, tapi juga partisipasi masyarakatnya.

Adi Pratondo :

Iya mbak, walaupun kita buat program ini itu bagus secara teori, tapi kalau masyarakat kurang aktif juga percuma. Kan tidak mungkin dari dinas menanyai atau mendata warga satu persatu diajak pelan-pelan.

Saya :

Njih pak. Memang harus jalan dua belah pihaknya pak.

Pak, yang saya tahu pemerintah setiap melaksanakan program penanggulangan itu membuat laporan pak. Betul ?

Adi Pratondo :

Betul memang mbak, laporan dibuat setiap akhir tahun dan disetorkan kepada Bappeda. Dibuat secara tertulis dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Sekarang ini pemerintah juga harus benar-benar bekerja sesuai program, karena segalanya sudah sistem online. Sehingga tidak boleh gegabah, apalagi bukan hanya atasan kepada bawahan yang bisa mengaudit, namun banyak pihak termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga bisa mengaudit kinerja pemerintah. Segalanya sudah online mbak, siapa saja bisa melihat kegiatan-kegiatan pemerintah, walaupun laporan resminya tetap di arsipkan.

Saya :

Begitu njih pak, mudah-mudahan kinerja pemerintah terus meningkat. Warga miskin juga menurun sertiap tahunnya, sehingga Semarang menjadi kota yang maju pak. Kalau begitu terimakasih pak atas informasi yang diberikan, sangat membantu saya pak.

Adi Pratondo :

oh ya mbak, sama-sama mbak mudah-mudahan sukses.

Hasil Wawancara

Warga Miskin Kota Semarang

Nama : Ibu Gampang

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 66 Tahun

Alamat : Jl Baskoro RT 03 / RW 07 Kelurahan Tembalang

Pekerjaan : Penjual soto grobak

Hari / tanggal : Minggu, 23 Agustus 2015

Saya :

Bu, ngertos program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah Kota Semarang bu ?

Ibu Gampang :

Boten mbak

Saya :

Menawi Peraturan Daerah ngertos ? Perda Nomor 4 Tahun 2008 ?

Ibu Gampang :

<p>Kulo niku masalah aturane pemerintah mboten mangertosi niku mbak. Ya yang penting niku kedah mados arto sitik-sitik mbak.</p>
<p>Saya :</p> <p>Nopo ibu niki mboten nopo njih lelah ngaten bu, nyambut tamel kan sampun sepuh.</p>
<p>Ibu Gampang :</p> <p>Njih sakjane kesel mbak, ning piye maneh. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun sudah tua kadang lelah. Tapi saya bisanya hanya membuat soto, jadi berjualan. Walaupun umur saya sudah tua begini mbak, ndak bisa diam saja dirumah.</p>
<p>Saya :</p> <p>Menawi saking pemerintah nopo kelurahan ibu angsal beras nopo mboten bu ?</p>
<p>Ibu Gampang :</p> <p>Angsal mbak, ben sasi alias tiap bulan nampi.</p>
<p>Saya :</p> <p>Berarti rutin njih bu ?</p>
<p>Ibu Gampang :</p> <p>Rutin mbak, mesti didumke tiap bulan.</p>

Saya :

Njih sampun menawi ngaten, maturnuwun njih bu, monggo.

Warga Miskin Kota Semarang

Nama : Bapak Parjono

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 62 Tahun

Alamat : Jl Baskoro RT 03 / RW 07 Kelurahan Tembalang

Pekerjaan : Tidak bekerja

Hari / tanggal : Minggu, 23 Agustus 2015

Saya : Permisi pak, niki pak Parjono njih ? (Permisi pak, ini betul pak Parjono ?)
Pak Parjo : Njih mbak, kulo pak parjo. (Iya mbak, saya pak Parjo)
Saya : Nuwunsewu, pak parjo niku angsal bantuan beras subsidi nopo raskin mboten pak ? (Permisi, pak parjo dapat bantuan beras subsidi atau raskin tidak ?)
Bapak Parjono :

<p>Njih mbak, kulo angsal ben sasi niku saking kalurahan. Wonten nopo mbak ?</p> <p>(Iya mbak, saya dapat setiap bulan dari kelurahan. Memang ada apa ?)</p>
<p>Saya :</p> <p>Mboten wonten nopo-nopo pak. Namung ngepaske mawon sinten-sinten ingkang nampi raskin. Njih sampun pak, maturnuwun.</p> <p>(Tidak ada apa-apa pak. Cuma membenarkan siapa saja yang dapat raskin itu pak. Ya sudah pak, terimakasih banyak)</p>
<p>Pak Parjo :</p> <p>Njih mbak sami-sami. (Iya sama-sama mbak)</p>
<p>Saya</p>

Warga Miskin Kota Semarang

Nama : Wahyudi / Yudi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 34 Tahun

Alamat : Jl Baskoro RT 03 / RW 07 Kelurahan Tembalang

Pekerjaan : Tukang bangunan / serabutan

Hari / tanggal : Minggu, 23 Agustus 2015

Saya :

Mas, ini betul mas Wahyudi ? saya Shellika.

Mas Yudi :

Iya mbak, priapun ada keperluan apa ?

Saya :

Tidak apa-apa mas, Cuma mau tanya mas Yudi ini kerja dimana mas ? sama penghasilannya berapa mas ?

Yudi :

Ndak menentu, kalau ada yang membutuhkan tukang untuk bantu-bantu

bangun masjid atau rumah atau apa saja. Biasanya karena tukang srabutan dibayar perhari 40.000. itu habis untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi tidak setiap hari dibutuhkan sebagai tukang

Saya :

Berarti musiman ya mas ? Dapat raskin dari RT tidak mas ?

Mas Yudi :

Ya musiman namanya mbak kalau ada yang butuh. Dapat dari RT mbak.

Saya :

Kalau Peraturan Daerah nya tau mas tentang bantuan kaya raskin, modal usaha atau pengobatan di puskesmas gratis ?

Mas Yudi :

Ndak mbak, saya ndak sekolah ndak tau begitu-begitu. Ya saya taunya bantuan dari pemerintah dari kelurahan kalau nerima ya saya terima. Suruh ke kelurahan ya saya kesana, gitu mabk kalau dari pemerintah atas aturan opo yo aku ndak tau mbak.

Saya :

Tapi kalau bantuan dari pemerintah dapat ya mas ? ya ikut merasakan lah bahasanya gitu.

Mas Yudi :

Oh kalau itu pasti dapat, kaya beras tadi ya tiap bulan pasti dapat mbak.

Saya :

Ya sudah mas Yudi, makasih banyak ya mas.

Hasil Wawancara

Warga Miskin Kota Semarang

Nama : Ibu Yatemi

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 50 Tahun

Alamat : Jl Baskoro RT 03 / RW 07 Kelurahan Tembalang

Pekerjaan : Tidak bekerja / janda

Hari / tanggal : Minggu, 23 Agustus 2015

Saya :

Bu, saya Shellika. Mau tanya apa betul bu Yatemi ini dapat raskin dari RT atau kelurahan ?

Ibu Yatemi :

Iya dapat mbvak, setiap bulan. Dulu pak Darjo, njuk pindah orangnya. Jadi dari RT saya dapat sebagai ganti dari Pak Darjo.

Saya :

Setiap bulan berarti ya bu ? gimana bu bisa membantu memenuhi

kebutuihan sehari-hari ?
<p>Ibu Yatemi :</p> <p>Setiap bulan mbak dapat raskin dari pemerintah, ya bisa membantu ekonomi setiap bulan. Jadi tidak usah beli beras diwarung lagi. Uangnya untuk beli sayur mayur</p>
<p>Saya :</p> <p>Kalau Peraturan Daerah tentang bantuan seperti itu tahu bu ? Perda Nomor 4 Tahun 2008 ?</p>
<p>Ibu Yatemi :</p> <p>Ndak tahu mbak saya kalau peraturan, Cuma di data sama pak RT trus dapat beras raskin, ngaten.</p>
<p>Saya :</p> <p>Njih sampun bu kalau gitu, terimakasih banyak bu.</p>
<p>Ibu Yatemi :</p> <p>Njih monggo mbak.</p>

Hasil Wawancara

Warga Miskin Kota Semarang

Nama : Bapak Tarjo

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 63 Tahun

Alamat : Jl Baskoro RT 02 / RW 07 Kelurahan Tembalang

Pekerjaan : Tidak bekerja

Hari / tanggal : Minggu, 23 Agustus 2015

Saya :

Permisi pak, saya Shellika. Mau tanya pak, ini benar pak Tarjo ?

Pak Tarjo :

Iya pak Tarjo, wonten nopo mbak ?

Saya :

Saya mau tanya pak, setiap bulan pak Tarjo ini dapat bantuan beras raskin mboten ?

Bapak Tarjo :

Dapat mbak, kadosipun sebulan sekali niku mbak.
<p>Saya :</p> <p>Dari kelurahan pak ?</p>
<p>Pak Tarjo :</p> <p>Njih mbak, mengke lewat RT.</p>
<p>Saya :</p> <p>Menawi peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 ngertos pak ?</p>
<p>Pak Tarjo :</p> <p>Menawi niku mboten mbak</p>
<p>Saya :</p> <p>Pak Tarjo dapat raskin dari RT ndata mriki pak ?</p>
<p>Pak Tarjo :</p> <p>Njih mbak, RT data mriki mangke trus kulo angsal beras niku.</p>
<p>Saya :</p> <p>Njih sampun pak, terimakasih banyak pak.</p>

Hasil Wawancara

Warga Kota Semarang

Nama : Ibu Rukhinah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 57 Tahun

Alamat : Jl Baskoro RT 02 / RW 07 Kelurahan Tembalang

Pekerjaan : Tidak bekerja

Hari / tanggal : Minggu, 23 Agustus 2015

Saya :

Bu, Pamsimas yang ada di depan itu dekat belokan warung pojok apa bantuan dari pemerintah ?

Bu Rukhinah :

Iya mbak Shelli, tahun berapa ya. 2009 kayanya mbak.

Saya :

Iya bu, di itu ada tulisannya si tahun 2009 bu. Itu bantuan dari pemerintah untuk apa bu ?

Ibu Rukhinah :

Pamsimas itu bantuan pemerintah, biar kalau musim kering tandon-tandon tersebut bisa digunakan untuk menyimpan air dan digunakan bersama

Saya :

Bantuan bersama gitu bu, satu RW berarti bukan RT ya bu ?

Ibu Rukhinah :

Itu memang buat satu RW mbak. Kan airnya ngalir lewat pipa kecil depan rumah-rumah warga itu. Sebelah sana depan pak RW yang dulu juga ada sumur resapan, Cuma dari teknik Undip dulu mbak.

Saya :

Kalau yang sumur bukan dari pemerintah ya bu, tapi Undip ?

Ibu Rukhinah :

Iya dulu dari teknik Undip bikin sumur resapan buat contoh apa buat apa dulu.



WALIKOTA SEMARANG

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 465/146/2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 465/0320/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG DAN
KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan keadaan dan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas program penanggulangan kemiskinan Kota Semarang serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/0320/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/99 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/0320/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/0320/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
14. Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/0320/2010 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/99 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 465/0320/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG DAN KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SEMARANG.

KESATU : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 465/0320/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang. ✕

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah pada susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang Dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 - 2 - 2014



SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Inspektur Kota Semarang;
3. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 465/146/2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 465/0320/2010 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG
DAN KELOMPOK PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK PROGRAM
1	2	3
1.	Walikota Semarang	Ketua
2.	Sekretaris daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Sekretaris
4.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Wakil Sekretaris



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 465/146/2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 465/0320/2010 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH (TKPKD) KOTA SEMARANG
DAN KELOMPOK PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK PROGRAM
1	2	3
I	KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA	
1.	Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Sekda Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
II	KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
5.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
6.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Wakil Ketua
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
III	KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL	
9.	Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Ketua
10.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang	Wakil Ketua
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang	Anggota
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota

1	2	3
IV	KELOMPOK PROGRAM LAINNYA	
13.	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang	Ketua
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang	Wakil Ketua
15.	Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang	Anggota
16.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 465 / 206 / 2014
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 465/00320/2010 TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)
KOTA SEMARANG DAN KELOMPOK
KERJA KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
I	KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI	
1.	Kepala Bidang Pengendalian dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik pada Sekretariat Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Seksi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang	Anggota
II	KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN	
7.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang	Ketua
8.	Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
9.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Bidang Sumber Daya Air, Energi, dan Geologi pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Semarang	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemanfaatan Jalan & Jembatan pada Dinas Bina Marga Kota Semarang	Anggota

K /

1	2	3
III	KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYARAKAT	
12.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Ketua
13.	Sekretaris Inspektorat Kota Semarang	Wakil Ketua
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
15.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
16.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup	Anggota



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 465 / 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 465/00320/2010 TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)
KOTA SEMARANG DAN KELOMPOK
KERJA KOORDINASI
PENAGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Politik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Litbang Tata Ruang dan Sarpras Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
10.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
11.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
12.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
13.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
14.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
15.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota

1	2	3
16.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
17.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
18.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
19.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
20.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
21.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota
22.	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Anggota



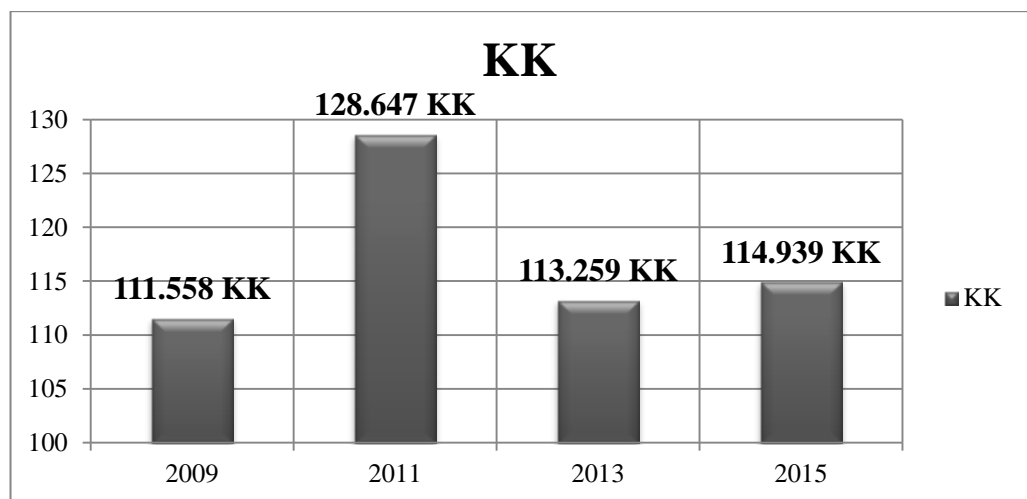
Lampiran 4

PerkembanganJumlahWargaMiskin Kota Semarang

2009, 2011, 2013, 2015

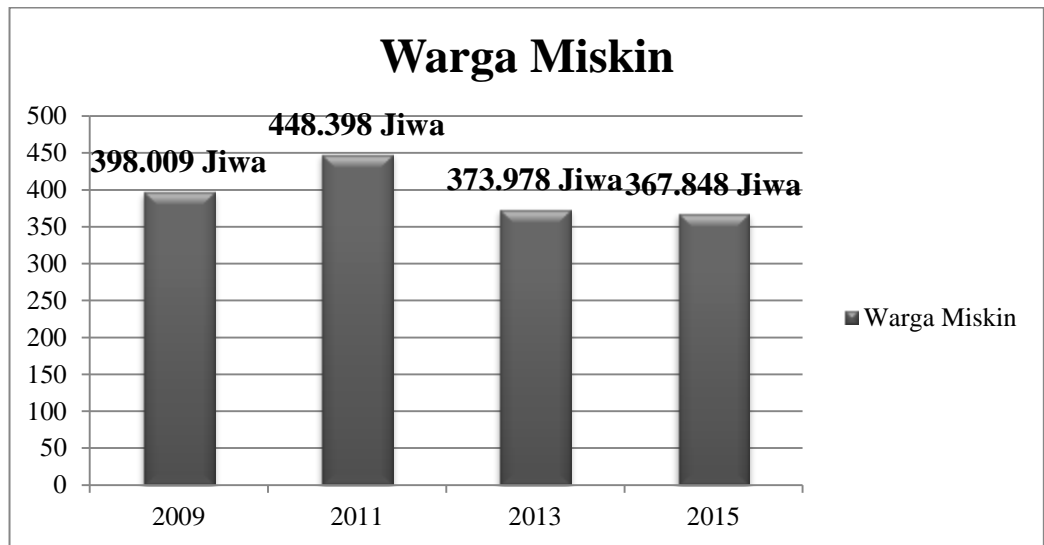
1. MenurutJumlahKepalaKeluarga (KK).

No	Keterangan	2009	2011	2013	2015
1	Jumlah KK	111.558	128.647	113.259	114.939



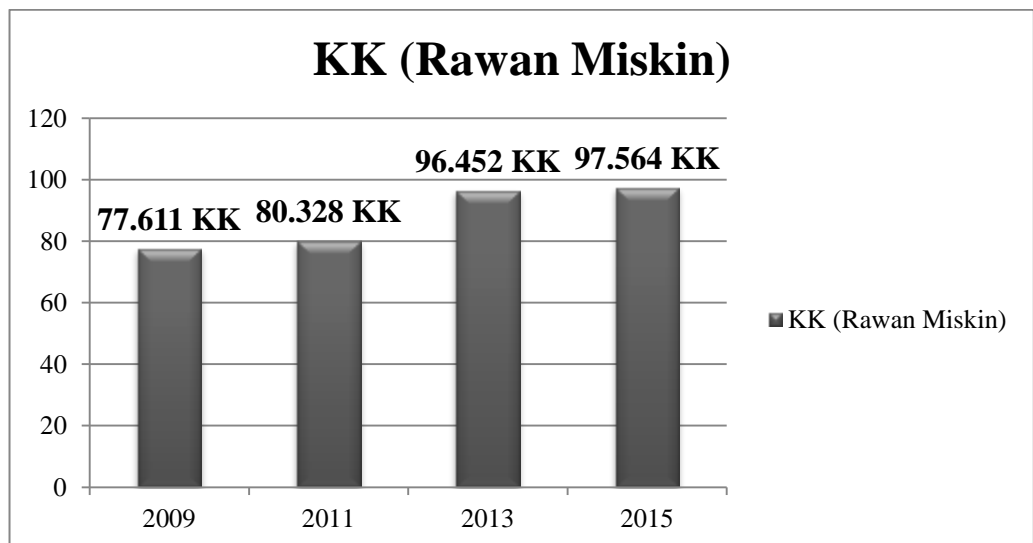
2. MenurutJumlahWargaMiskin (Jiwa).

No	Keterangan	2009	2011	2013	2015
1	WargaMiskin	398.009	448.398	373.978	367.848



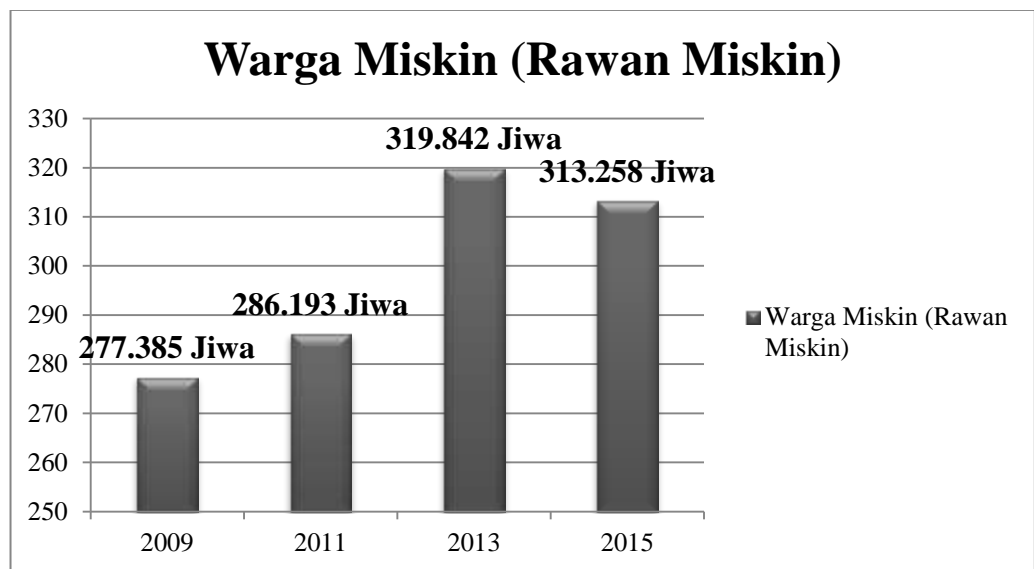
3. Menurut Jumlah Kepala Keluarga (KK Rawan Miskin).

No	Keterangan	2009	2011	2013	2015
1	KK (Rawan Miskin)	77.611	80.328	96.452	97.564



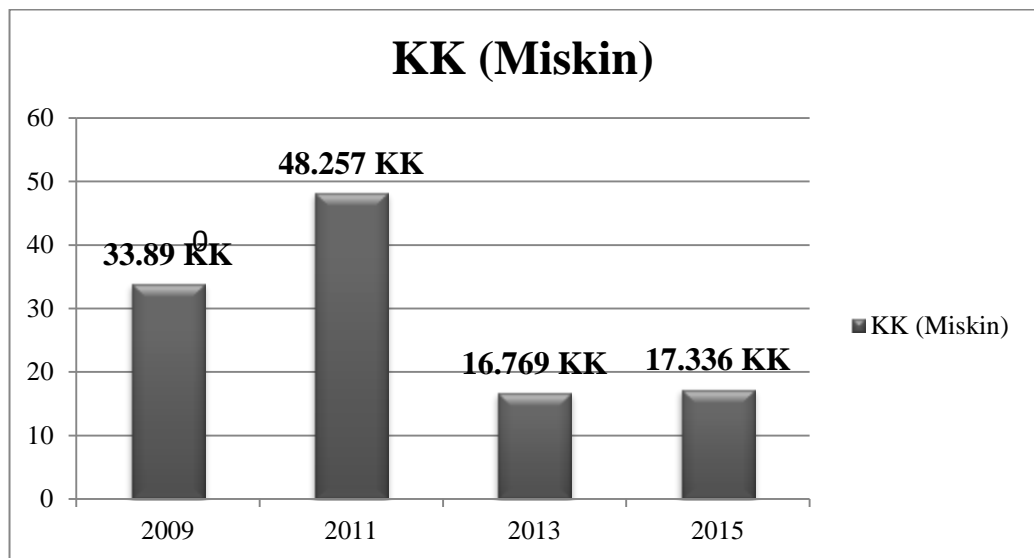
4. Menurut Jumlah Warga Miskin (Jiwa Rawan Miskin).

No	Keterangan	2009	2011	2013	2015
1	Warga Miskin (Rawan Miskin)	277.385	286.193	319.842	313.258



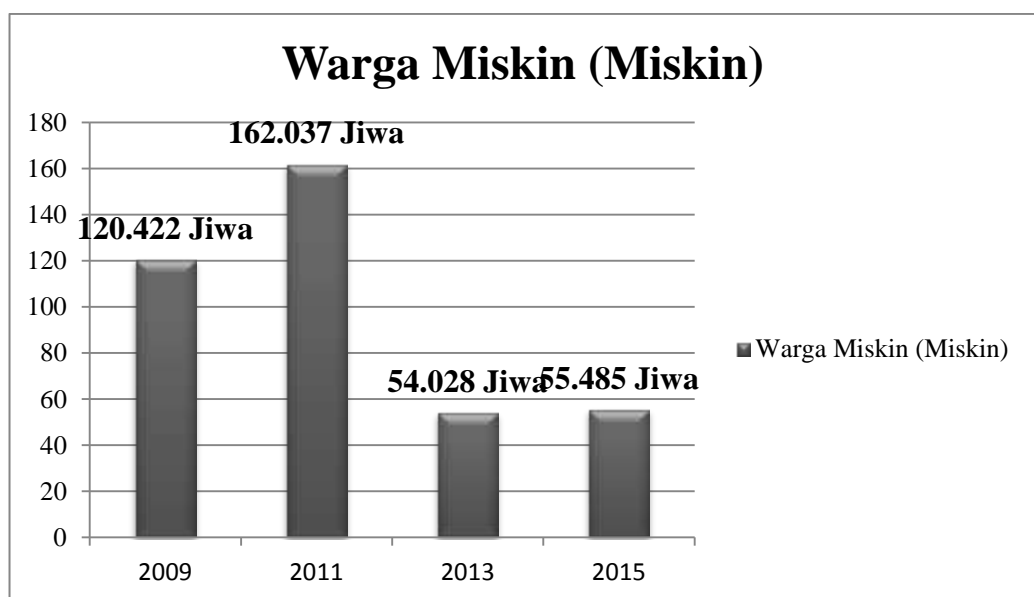
5. Menurut Jumlah Kepala Keluarga (KK Miskin).

No	Keterangan	2009	2011	2013	2015
1	KK (Miskin)	33.890	48.257	16.769	17.336



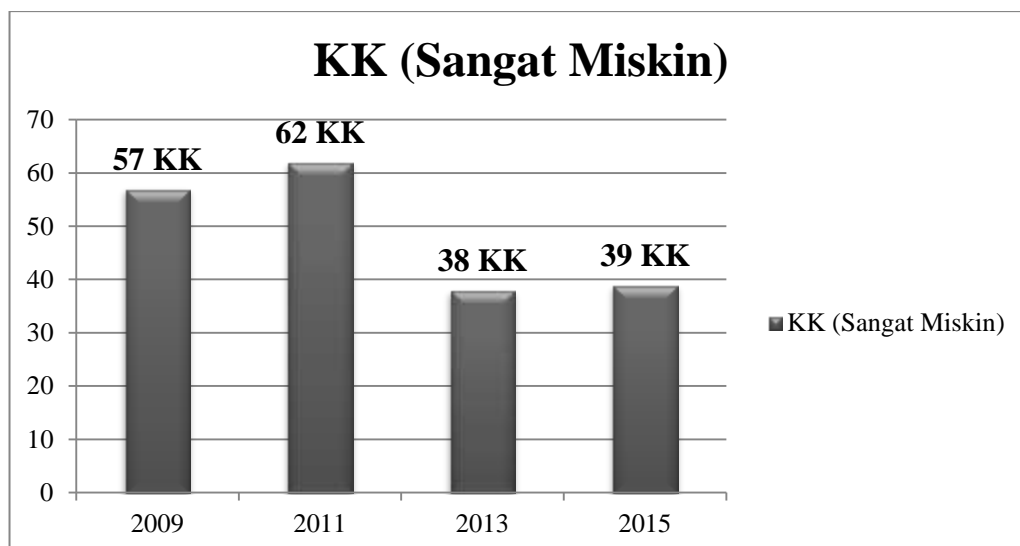
6. Menurut Jumlah Warga Miskin (Jiwa Miskin)

No	Keterangan	2009	2011	2013	2015
1	Warga Miskin	120.422	162.037	54.028	55.485



7. Menurut Jumlah Kepala Keluarga (KK Sangat Miskin).

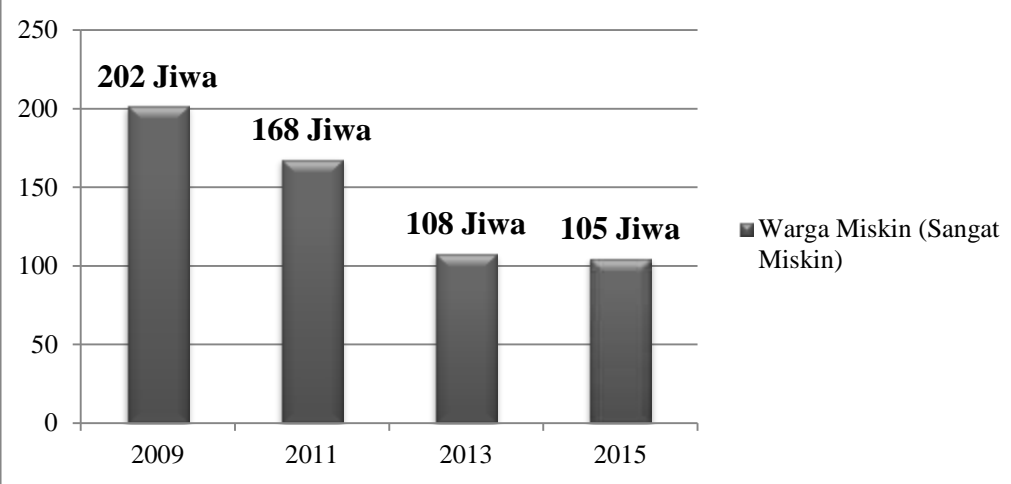
No	Keterangan	2009	2011	2013	2015
1	KK (Sangat Miskin)	57	62	38	39



8. Menurut Jumlah Warga Miskin (Jiwa Sangat Miskin)

No	Keterangan	2009	2011	2013	2015
1	Warga Miskin (Sangat Miskin)	202	168	108	105

Warga Miskin (Sangat Miskin)



Lampiran 5

REKAPITULASI GAKIN KOTA SEMARANG TAHUN 2015

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kreteria Kemiskinan					
			Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	SEMARANG TENGAH	MIROTO	239	711	184	584	-	-
		BRUMBUNGAN	340	1.013	85	287	-	-
		JAGALAN	346	913	165	491	11	35
		KRANGGAN	174	490	130	372	1	1
		GABAHAN	527	1.653	375	1.199	-	-
		KEMBANGSARI	246	631	127	345	-	-
		SEKAYU	296	904	54	155	-	-
		PANDANSARI	249	776	36	77	-	-
		BANGUNHARJO	150	430	33	94	-	-
		KAUMAN	159	532	51	140	-	-
		PURWODINATAN	575	1.730	219	669	-	-
		KARANGKIDUL	351	1.073	41	143	-	-
		PEKUNDEN	197	601	68	198	-	-
		PINDRIKAN KIDUL	100	280	24	62	-	-
		PINDRIKAN LOR	156	514	229	684	1	4
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		4.105	12.251	1.821	5.500	13	40
2	SEMARANG UTARA	BANDARHARJO	2.088	7.115	436	1.396	-	-
		BULU LOR	1.058	3.654	264	961	2	8

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kreteria Kemiskinan					
			Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
		PLOMBOKAN	680	2.288	349	1.231	-	-
		PURWOSARI	737	2.243	82	239	-	-
		KUNINGAN	1.136	3.583	161	478	1	2
		PANGGUNG LOR	55	170	3	10	-	-
		PANGGUNG KIDUL	635	2.111	112	360	-	-
		TANJUNG MAS	3.470	11.593	853	2.787	1	4
		DADAPSARI	1.068	3.605	217	757	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		10.927	36.362	2.477	8.219	4	14
3	SEMARANG TIMUR	KEMIJEN	1.203	3.898	168	532	-	-
		REJOMULYO	277	806	129	445	-	-
		MLATIBARU	444	1.411	119	362	2	4
		KEBONAGUNG	435	1.367	36	110	-	-
		MLATI HARJO	392	1.293	27	102	-	-
		BUGANGAN	494	1.587	127	364	1	1
		SARIREJO	806	2.454	137	445	-	-
		REJOSARI	1.060	3.461	107	362	-	-
		KARANGTURI	189	642	48	153	-	-
		KARANGTEMPEL	64	227	16	64	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		5.364	17.146	914	2.939	3	5
4	GAYAMSA	TAMBAKREJO	1.35	4.336	99	316	-	-

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kreteria Kemiskinan					
			Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
	RI		4					
		KALIGAWA	915	3.096	169	571	-	-
		SAWAHBESAR	1.234	3.939	182	597	-	-
		SIWALAN	474	1.606	38	124	-	-
		SAMBIREJO	605	1.791	79	207	-	-
		PANDEANLAMPER	848	2.830	77	281	-	-
		GAYAMSARI	395	1.406	63	211	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		5.825	19.004	707	2.307	-	-
5	GENUK	SEMBUNGHARJO	679	2.286	58	190	-	-
		KUDU	515	1.751	71	227	1	2
		KARANGROT	636	2.131	268	843	1	4
		GENUKSARI	986	3.417	44	126	-	-
		BANJARDOWO	738	2.368	87	259	-	-
		GEBANGSARI	146	496	3	8	-	-
		TRIMULYO	370	1.308	35	108	-	-
		PENGGARONLOR	217	734	85	285	-	-
		MUKTIHARJOLOR	203	686	89	275	-	-
		BANGETAYUKULON	1.377	3.607	295	859	-	-
		BANGETAYUWETAN	702	2.310	61	175	-	-
		TERBOYOKULON	62	187	1	4	-	-
		TERBOYUWETAN	227	795	18	72	-	-

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kreteria Kemiskinan					
			Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		6.858	22.076	1.115	3.431	2	6
6	PEDURUNGAN	PENGGARON KIDUL	244	756	7	24	-	-
		TLOGOMULYO	457	1.511	105	314	-	-
		TLOGOSARI WETAN	517	1.786	16	49	-	-
		TLOGOSARI KULON	608	2.076	35	112	-	-
		MUKTIHARJO KIDUL	1.440	4.789	171	583	-	-
		PLAMONGAN SARI	519	1.683	42	137	-	-
		GEMAH	1.226	4.067	66	230	-	-
		PEDURUNGAN KIDUL	392	1.342	87	298	-	-
		PEDURUNGAN LOR	271	967	26	88	-	-
		PEDURUNGAN TENGAH	381	1.218	39	143	-	-
		PALEBON	536	1.709	37	135	-	-
		KALICARI	262	817	18	58	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		6.853	22.721	649	2.171	-	-
7	SEMARANG SELATAN	RANDUSARI	825	2.646	174	472	-	-
		BULUSTALAN	284	909	146	456	-	-
		BARUSARI	429	1.307	86	272	-	-
		MUGASARI	691	1.772	89	307	-	-

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kreteria Kemiskinan					
			Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
		PLEBURAN	271	860	9	33	-	-
		WONODRI	747	2.203	147	463	-	-
		PETERONGAN	621	1.993	203	583	-	-
		LAMPER LOR	593	1.914	92	280	-	-
		LAMPER KIDUL	276	838	33	109	-	-
		LAMPER TENGAH	1.047	3.322	225	734	3	4
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		5.784	17.764	1.204	3.709	3	4
8	CANDISARI	CANDI	1.473	4.626	118	401	-	-
		JATINGALEH	443	1.460	72	257	1	2
		KALIWIRU	215	640	79	257	-	-
		JOMBLANG	1.673	5.492	622	1.999	-	-
		KARANGANYAR GUNUNG	1.155	3.721	177	562	-	-
		TEGALSARI	790	2.503	124	392	-	-
		WONOTINGAL	616	1.889	6	19	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		6.365	20.331	1.198	3.887	1	2
9	GAJAHMUNGGUR	KARANGREJO	575	1.862	74	249	-	-
		BENDANDUWUR	363	1.208	24	80	-	-
		BENDANNGISOR	332	1.040	30	83	-	-
		SAMPANGAN	576	1.963	81	245	-	-
		GAJAHMUNGKUR	1.290	3.825	125	350	-	-

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kreteria Kemiskinan					
			Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
		LEMPONGSARI	462	1.437	39	121	-	-
		PETOMPON	554	1.724	20	47	-	-
		BENDUNGAN	443	1.343	39	128	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		4.595	14.402	432	1.303	-	-
10	TEMBALANG	METESEH	1.056	3.316	40	120	-	-
		ROWOSARI	1.631	5.650	327	993	2	3
		MANGUNHARJO	360	1.243	16	56	-	-
		BULUSAN	212	683	39	112	-	-
		KRAMAS	156	457	32	109	-	-
		TEMBALANG	60	186	10	28	-	-
		JANGLI	571	1.889	135	406	-	-
		TANDANG	2.252	7.106	473	1.465	-	-
		KEDUNGUMUNDU	146	501	36	110	-	-
		SENDANGGUWO	1.688	5.582	77	241	-	-
		SENDANGMULYO	675	2.380	149	567	1	3
		SAMBIROTO	608	2.089	65	242	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		9.415	31.082	1.399	4.449	3	6
11	BANYUMANIK	PUDAKPAYUNG	361	1.217	70	244	-	-
		GEDAWANG	269	894	64	198	-	-
		JABUNGAN	283	932	129	379	-	-
		PEDALANGA	313	857	46	115	-	-

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kreteria Kemiskinan					
			Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
		N						
		BANYUMANIK	540	1.766	62	187	-	-
		SRONDOL KULON	498	1.427	77	211	-	-
		SRONDOL WETAN	416	1.397	138	417	-	-
		NGESREP	498	1.608	30	104	-	-
		TINJOMOYO	324	993	55	188	-	-
		PADANGSARI	216	649	29	96	-	-
		SUMURBOTO	151	479	23	70	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		3.869	12.219	723	2.209	-	-
12	GUNUNGPATI	PAKINTELAN	294	842	9	19	-	-
		MANGUNSARI	270	891	14	36	-	-
		PLALANGAN	94	245	16	42	-	-
		GUNUNGPATI	483	1.443	156	427	-	-
		NONGKOSAWIT	323	1.085	47	136	-	-
		PONGANGAN	543	1.756	32	121	-	-
		NGIJO	152	434	5	11	-	-
		PATEMON	207	540	64	182	-	-
		SEKARAN	313	998	8	21	-	-
		SUKOREJO	615	2.130	432	1.423	-	-
		SADENG	190	555	24	76	-	-
		CEPOKO	408	1.164	28	71	-	-
		JATIREJO	218	690	26	75	-	-
		SUMURREJO	210	617	33	103	-	-
		KALISEGORO	182	556	11	27	-	-

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kreteria Kemiskinan					
			Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
		KANDRI	290	804	29	49	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		4.792	14.750	934	2.819	-	-
13	SEMARANG BARAT	NGEMPLAK SIMONGAN	1.101	3.567	177	538	-	-
		MANYARAN	1.406	4.656	55	175	-	-
		KRAPYAK	322	1.048	25	71	-	-
		TAMBAKHARJO	221	676	49	144	-	-
		KALIBANTENG KULON	404	1.348	45	140	-	-
		KALIBANTENG KIDUL	301	985	44	132	-	-
		GISIKDRONO	1.026	3.352	181	610	-	-
		BONGSARI	1.020	3.194	105	335	-	-
		BOJONGSALAMAN	730	2.053	57	154	-	-
		SALAMANMLOYO	251	813	15	51	-	-
		CABEAN	159	447	62	156	-	-
		KARANGAYU	623	2.125	115	375	-	-
		KROBOKAN	797	2.609	244	855	-	-
		TAWANGSARI	73	231	31	88	-	-
		TAWANGMAS	377	1.190	47	140	-	-
		KEMBANGARUM	1.984	6.692	56	186	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		10.795	34.986	1.308	4.150	-	-
14	MIJEN	CANGKIRAN	200	585	31	112	-	-

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kreteria Kemiskinan					
			Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
		BUBAKAN	50	166	-	-	-	-
		KARANGMALANG	178	503	44	103	-	-
		POLAMAN	84	247	29	81	-	-
		PURWOSARI	289	935	146	374	2	8
		TAMBANGAN	129	354	59	172	1	1
		WONOLOPO	367	1.247	34	93	-	-
		MIJEN	230	786	87	296	-	-
		JATIBARANG	97	305	211	716	-	-
		KEDUNGPANI	380	1.120	193	559	1	4
		NGADIRGO	601	1.914	149	397	-	-
		WONOPLUMBON	495	1.566	162	466	1	2
		JATISARI	173	505	112	391	-	-
		PESANTREN	170	529	29	68	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		3.443	10.762	1.286	3.828	5	15
15	NGALIYAN	GONDORIYO	292	868	18	44	-	-
		PODOREJO	545	1.831	125	398	1	4
		BRINGIN	477	1.545	22	57	-	-
		PURWOYOSO	1.295	3.929	103	287	-	-
		KALIPANCUR	839	2.889	144	473	-	-
		BAMBANKEREP	227	791	65	189	-	-
		NGALIYAN	223	698	7	29	-	-
		TAMBAKAJI	969	2.970	29	79	-	-
		WONOSARI	851	2.605	130	368	-	-
		WATES	327	1.055	86	263	-	-
	Jumlah Jiwa		6.04	19.18	729	2.18	1	4

No.	Kecamatan	Kelurahan	Kreteria Kemiskinan					
			Hampir Miskin		Miskin		Sangat Miskin	
			KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
	Per Kecamatan		5	1		7		
16	TUGU	JERAKAH	225	764	94	288	2	3
		TUGUREJO	515	1.646	41	119	1	1
		KARANGANYAR	309	959	69	217	-	-
		RANDUGARUT	210	681	25	90	-	-
		MANGKANG WETAN	563	1.922	104	348	-	-
		MANGKANG KULON	289	856	53	151	1	5
		MANGUNHARJO	418	1.393	54	164	-	-
	Jumlah Jiwa Per Kecamatan		2.529	8.221	440	1.377	4	9
	T o t a l		97.564	313.258	17.336	54.485	39	105

Lampiran 6

Kegiatan SKPD – TRPKD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2013 – 2015

NO	PROMOSI KEGIATAN	ANGGARAN					Jumlah TOTAL
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Dinas Kesehatan						
1	Pelayanan Jarak Jauh (yang belum tersedia Puskesmas)						
2	Peningkatan kualitas gizi anak / kurang gizi dan pemberian vitamin (pemberian vitamin komprehensif)						
3	Peningkatan Kualitas Energi Pasien, Asuransi						
4	Pembuatan MP ASI bagi balita 0 – 24 bulan BHKI miskin						
5	Pengadaan PMT Rumah KUK Gakin di Puskesmas						
6	Pelatihan Komunitas Mandiri						

7	Pembinaan dan pelatihan PKT						
8	Pembinaan lingkungan sehat / pemberian pelayanan vitamin gigit						
9	Pengadaan PMT gizi untuk 10 rumah sakit di rumah						
	Jumlah						
10	Dinas Pendidikan						
1	Peningkatan BUKU GIN/IN untuk sekolah miskin						
2	Peningkatan BUKU SAKSI/SAKSI untuk sekolah miskin						
3	Peningkatan BUKU SAKSI/SAKSI untuk sekolah miskin						
4	Peningkatan BUKU SAKSI/SAKSI untuk sekolah miskin						
5	Peningkatan BUKU SAKSI/SAKSI untuk sekolah miskin						
6	Peningkatan BUKU SAKSI/SAKSI untuk sekolah miskin						
7	Peningkatan BUKU SAKSI/SAKSI untuk sekolah miskin						
8	Peningkatan BUKU SAKSI/SAKSI untuk sekolah miskin						

Konsentrasi Bahan Pustaka					
5	Peningkatan Hasil Hiji perunggungan konvensional				
	Jumlah				
12	Bidang Lingkungan Hidup				
1	Daerah sasaran produksi / studi-budhas				
2	Daerah asal dan pemukiman biogas dan sistem tenaga				
3	Pengembangan teknologi tenaga gas di bidang lingkungan hidup dan sistem air kompositing limbah domestik				
4	Pembelajaran masyarakat pengolahan lingkungan dan sistem tenaga pelat sengap				
5	Daerah hasil sasaran untuk konvensional / mangrove				
6	Pengendalian dampak perubahan iklim pada air-sedang dan pengujian kondisi air sengap				

Jumlah					
13	Bidang PISA dan PISA				
1	Peningkatan Program Peningkatan				
2	Peningkatan sistem sistem dalam				
3	Peningkatan sistem air tanah / sistem air tanah				
4	Peningkatan sistem Peningkatan air tanaman (sistem / RSP Air)				
5	Peningkatan sistem air tanah				
6	Peningkatan sistem untuk Wast Long Wast Supply				
	Jumlah				
14	Bidang Tata Kota dan Perumahan				
1	Pembinaan jalan lingkungan pemukiman / perumahan				
2	Rehabilitasi Tidak Layak Huni / RTH				
3					
4	Pembinaan sanitasi komunal pemukiman				
5	Peningkatan / pemukiman pemukiman				

Kerangka acuan program									
1	Pembinaan secara langsung lingkungan pemukiman								
2	Pembangunan Fasilitas Program 1.5 km dan 2 km dari pusat pemerintahan (UPB) Support to PPA								
3	Pembinaan secara langsung lingkungan pemukiman								
4	Pembangunan / perbaikan infrastruktur sanitasi / MCK								
5	Studi investigasi pemukiman warga kurang mampu								
10	Studi investigasi pemukiman kumuh								
11	Studi investigasi secara langsung lingkungan pemukiman								
12	Peningkatan infrastruktur Kota Samarang Jumlah								
15	Dinas Bina Marga								
1	Pembangunan / pemeliharaan jalan dan								

Kerangka acuan program									
2	Pembinaan secara langsung lingkungan pemukiman								
	Jumlah								
16	Dinas Kesehatan dan Pertamanan								
1	Pembangunan TPST (Indramayu)								
2	Pengadaan gedung sampah								
3	Pengadaan busak sampah								
4	Pengadaan tong sampah								
	Jumlah								
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
1	Pembinaan kelompok sadar wisata dan pelatihan kewirausahaan kluster Sandiwaga / seni								
18	Dishubkominfo								
1	Transportasi umum untuk rakyat (subsidi operasional Bus Rapi dan Transit / BRT)								
19	Dipendekapoli								
1	Sinkronisasi data warga masuk Kota								

Lampiran 7

Power Point Pelaksanaan Gerdu Kempling Tahun 2014 Oleh TKPKD Kota
Semarang



Lampiran 8

Dokumentasi Dengan Bapak Sri Hartono

Gambar 1



Gambar 2



Dokumentasi Dengan Ibu Sulamatul F

Gambar 1



Gambar 2



Dokumentasi Dengan Bapak Adi Pratondo

Gambar 1



Gambar 2



Dokumentasi RW 07 Kelurahan Tembalang

Gambar 1



Dokumentasi Kegiatan Gerdu Kempling

Gambar 1 Bantuan Bibit Lele di Bulusan



Gambar 2 Bantuan Beras Bersubsidi



Gambar 3 Rehab Rumah Tidak Layak Huni



Gambar 4 Bantuan Usaha dan Sarana Ketrampilan



Gambar 5 Bantuan Alat Pertanian di Mijen



Gambar 6 Bantuan Ternak



Gambar 7 Bantuan Usaha dan Pelatihan Menjahit

